BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai isu strategis yang terkait dengan permasalahan pembangunan daerah yang dirinci menurut urusan yaitu urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, pilihan dan penunjang. Selain itu juga memuat isu-isu strategis internasional, kebijakan nasional, dan isu-isu sektoral lainnya

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan penting dilakukan sebagai basis merumuskan isu strategis. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan Provinsi Papua 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di Bab II sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan sebagai berikut.

4.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis pembangunan melalui urusan wajib dasar ini menjadi sektor yang strategis dalam rencana pembangunan. Urusan ini menjadi aspek layanan paling mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat di Provinsi Papua.. Urusan wajib dasar terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

4.1.1.1. Pendidikan

Penyelenggaraan layanan pendidikan di Provinsi Papua masih menghadapi berbagai masalah, baik itu pada akses, kualitas maupun tata kelola pendidikan. Pada akses pendidikan, sampai saat ini Provinsi Papua belum dapat menuntaskan program nasional wajib belajar sembilan tahun, karena sampai dengan tahun 2017 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hanya mencapai 6,3 tahun dengan perubahannya yang sangat lambat sebesar 0.1325 poin per tahun selama periode 2013-2017. Selain itu, jika diamati secara spasial terlihat ada ketimpangan akses pendidikan yang sangat mencolok, dimana RLS yang paling tinggi adalah 11,2 tahun di Kota Jayapura dan RLS terendah 1,9 tahun di Kabupaten Puncak. Ada deviasi yang sangat tinggi sekali antara terendah dengan tertinggi mencapai 9,2 poin. Dari aspek kualitas, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah ABA (Angka Buta Aksara). Meskipun dari kecenderungannya terlihat ABA di Papua semakin menurun, akan tetapi kondisinya masih jauh di bawah standar nasional. Pada tahun 2017 misalkan, ABA untuk Provinsi Papua mencapai 12,88% jauh di atas ABA Indonesia sebesar 2,07% untuk tahun yang sama. Selain itu juga terjadi ketimpangan yang sangat mencolok dalam pengentasan buta aksaraf. Pada umumnya di wilayah yang mudah akses memiliki ABA sangat rendah, bahkan ada diantaranya mencapai 0% seperti di Kota Jayapura, Kabupaten Merauke dan Biak Numfor. Sementara untuk daerah-daerah sulit akses dan pegunungan rata-rata tingkat buta aksara penduduk masih sangat tinggi antara 19,35 - 56,17% seperti di Kabupaten Intan Jaya, Yalimo, Nduga, Puncak, Paniai, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Tolikara dan Puncak Jaya.

Semua hal di atas pada akhirnya membuat daya saing pendidikan di Provinsi Papua terlihat belum optimal, yang merupakan permasalahan pokok yang perlu diatasi untuk lima tahun mendatang, dengan permasalahan dan akar masalah yang dapat dijabarkan singkat sebagai berikut.

Tabel 4.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Akses, mutu dan tata kelola pendidikan belum	Akses terhadap layanan pendidikan belum optimal	1. Ketersediaan tenaga pendidik belum merata
optimal	2. Kualitas pendidikan yang relatif masih rendah	Cakupan sekolah pada daerah dengan aglomerasi rendah belum optimal

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	3. Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan	 Kelayakhunian bangunan sekolah relatif rendah
	•	 Angka putus sekolah SD yang masih tinggi di Mamta dan La pago
		Angka putus sekolah SMP yang tinggi di Me Pago, Anim Ha dan La Pago
		Belum optimalnya akses pendidikan pada jenjang SMA/SMK
		Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK yang masih tinggi
		8. Belum maksimalnya melek aksara penduduk
		9. Pelayanan PKBM yang relatif rendah
		Kualifikasi mengajar tenaga pendidik belum optimal
		 Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap pelaksanaan tugas masih relatif rendah
		 Ketersediaan tenaga kependidikan belum merata terutama di wilayah adat Lapago, Mepago, dan sebagian wilayah Haanim
		13. Penerapan kurikulum sesuai dengan standar belum maksimal terutama di wilayah adat Lapago dan Mepago
		Penerapan manajemen berbasis sekolah belum optimal
		15. Pendidikan ekstrakulikuler dan program pengayaan belum berkembang dengan optimal
		Belum optimalnya akses pendidikan pada jenjang SMA/SMK

4.1.1.2. Kesehatan

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan merupakan bagian krusial dalam memastikan produktivitas sumber daya manusia dalam berkontribusi terhadap upaya pembangunan. Namun demikian, urusan kesehatan di Provinsi Papua masih menghadapi berbagai persoalan. Permasalahan pokok bidang kesehatan di Provinsi Papua terutama terkait dengan rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat yang dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH) walaupun terlihat secara rerata mengalami peningkatan di Papua, namun jika ditelaah nampak Kabupaten di wilayah Ha Anim dan La Pago seperti Boven Digul, Asmat, Jayawijaya dan Nduga capaiannya masih dibawah 60 tahun. Selain itu juga dari aspek status gizi bukan saja masalah gizi buruk yang perlu mendapat perhatian namun juga gizi berlebih terlihat menonjol di Papua jika dibanding dengan rata-rata

Indonesia. Demikain juga terkait stunting (pendek) perlu mendapatkan perhatian di Papua karena capaiannya yang berada diatas rata-rata Indonesia. Fakta lainnya lagi adalah Angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua per 100.000 penduduk selama ini termasuk dalam kategori tinggi, dimana data terakhir tahun 2017 menunjukan terjadi kematian ibu sebesar 289 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Papua secara keseluruhan masih rendah, hanya 41,52% di tahun 2017, termasuk juga kunjungan K4 lengkap bagi ibu hamil sangat rendah hanya sebesar 40,90% pada tahun 2017. Sedangkan dari sumber daya kesehatan yang tersedia, terlihat bahwa sebaran puskesmas di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2016 belum terdistribusi secara merata ke 29 kabupaten/kota. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah rasio dokter terhadap penduduk, dimana pada tahun 2016 hanya mencapai 24,13 dokter per 100.000 penduduk. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab juga belum maksimalnya penanganan penyakita malaria di Provinsi Papua, sehingga sampai tahun 2017 tercatat API Provinsi Papua paling tinggi di Indonesia yaitu 59 per 1.000 penduduk, yang cenderung meningkat bila dibandingkan tahun 2014. Dalam hal kasus HIV/AIDS terindikasi jumlah kasus kematian akibat virus mematikan tersebut terus mengalami kenaikan, hingga pada tahun 2017 tercatat ada 1.883 kematian akibat HIV/AIDS.

Terkait dengan berbagai kondisi kesehatan di Provinsi Papua di atas, maka dapat disampaikan permasalahan pokok dan akar masalah pembangunan kesehatan untuk masa mendatang di Provinsi Papua sebagai berikut.

Tabel 4.2. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Pokok Masalah	Ru	ımusan Masalah		Akar Masalah
1. Derajat, akses dan sumberdaya kesehatan masyarakat yang belum optimal	pe m:	elum optimalnya elayanan kesehatan asyarakat secara erata	1.	Belum optimalnya pelayanan Puskesmas
	de	asih rendahnya erajad kesehatan ibu an anak	2.	Kualitas layanan kesehatan yang belum maksimal
	pe m	elum optimalnya enanganan penyakit enular dan tidak enular	3.	Aksesbilitas dan pelayanan kesehatan belum merata menjangkau seluruh kabupaten
	_	paya kesehatan ibu an anak belum	4.	Kemiskinan atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah
		maksimal		minimal
	5.	Penanggulangan	5.	Pengeluaran perkapita masyarakat
		penyakit Menular		untuk kesehatan yang masih rendah
		belum optimal		
	6.	Meningkatnya status	6.	Pola asuh yang kurang tepat
		gizi buruk	7.	Belum maksimalnya pelayanan
				kefarmasian dan obat-obatan
				tradisional
			8.	Pelayanan kefarmasian dan obat-
				obat tradisional yang belum memadai
			9.	Masih tingginya angka penderita
			١,	malaria
			10	Meningkatnya pengidap HIV/AIDS
			10.	terutama di wilayah La Pago dan Me
				Pago
			11.	Kesadaran masyarakat dampak
				bahaya seks bebas masih rendah
			12.	Frekuensi kunjungan ibu hamil ke
				pelayanan kesehatan masih rendah
				Angka kematian ibu masih tinggi
			14.	Tingginya angka kematian
			15	perempuan
			15.	Belum optimalnya penanganan agar AHH perempuan meningkat
			16	Pemenuhan gizi masyarakat belum
			10.	ideal
			17.	Sosialisasi dampak gizi buruk belum
				optimal
			18.	Pemahaman masyarakat tentang
				pentingnya gizi bagi ibu dan anak
				masih rendah
			19.	Sosialisasi faktor pemicu gizi lebih
			20	belum optimal Ketersediaan dan kedisiplinan
			20.	tenaga medis rendah
			21.	Keterbatasan dan penyebaran yang
				tidak merata tenaga medis dan
				cenderung menurun
			22.	Keterbatasan sarana prasarana
				rumah sakit daerah
			23.	Belum optimalnya pelayanan rumah
			2.4	sakit daerah
			24.	Kondisi lingkungan yang buruk
			25	beresiko pada kesehatan Masih tingginya kematian ibu (OAP)
			۵۵.	melahirkan
			26.	Belum optimalnya pelayanan
				kesehatan pada bayi OAP baru lahir
			27.	Rendahnya anak-anak OAP yang
				memiliki gizi baik
			28.	Ketersediaan tenaga medis dan
				nonmedis, serta puskemas masih
				belum memadai dan dibawah
			1	standar

4.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan vang teriadi di Provinsi Papua berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berkaitan dengan dua hal yaitu belum optimalnya akses dan kualitas infrastruktur dasar. Akses dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan merupakan hal yang yital sebagai penghubung antar pusat-pusat social, ekonomi dan pemukiman. kondisi jalan dan jembatan yang rusak atau tidak mantap akan berdampak pada terhambatnya mobilitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan ekonomi maupun social. Perkembangan jalan dalam kondisi baik di Papua sepanjang tahun 2014-2017 menunjukkan kecenderungan penurunan kecuali untuk kota Jayapura. keseluruhan kondisi kemantapan jalan dalam kondisi baik di Papua menurun, dari 66,78 persen di tahun 2014 menjadi 34,31 persen di tahun 2017. Namun jika di rinci khusus tahun 2016, kondisi jalan provinsi dengan Panjang 2.191,29 km dalam kondisi baik mencapai 75,16 persen, jalan Kabupaten dengan Panjang 12.651,35 km dalam kondisi baik 49,75 persen dan jalan kota dengan Panjang 248,24 km dalam kondisi baik mencapai 81 persen tahun 2016, Sedangkan untuk kondisi jembatan di Papua tahun 2016 dari 914 jembatan nasional dalam kondisi baik hanya mencapai 28,45 persen, kondisi sedang 18,16, kondisi rusak berat dan ringan masing-masing 19,58 persen dan 21,55 persen sedangkan kondisi putus dan kritis masing-masing 1.65 persen dan 10,61 persen (Buku Informasi Statisitik 2017). Dari sisi aksesbilitas yang dilihat dari rasio Panjang jalan dengan luas wilayah masih tahun 2016 sebesar 0,06 persen. Berikut pemetaan permasalahan dan akar masalah urusan pekerjaan umum di Papua.

Tabel 4.3. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya konektivitas	1. Aksesbilitas penduduk yang sangat rendah	Konstruksi jalan dan jembatan tidak sesuai standar
transportasi	2. Belum maksimalnya mobilitas penduduk	 Lambatnya rehabilitasi jalan dan jembatan rusak Belum terhubungnya beberapa ibukota kabupaten Belum optimalnya konektivitas antar kawasan strategis provinsi
	 Belum optimalnya ketersediaan air baku Belum optimalnya ketersediaan air untuk 	Belum optimalnya pengawasan pemanfaatan ruang Minimnya ketersediaan jaringan irigasi

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	irigasi pertanian 3. Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	Banyak daerah yang belum memiliki sumber air baku kontinyu
	4. Belum memadainya jaringan irigasi	4. Banyak daerah belum mengoptimalkan sumber air baku secara kontinyu
	5. Belum optimalnya pemeliharaan jaringan irigasi	5. Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pengendali banjir

4.1.1.4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Akses Pemukiman layak huni masih menjadi persoalan utama dalam urusan ini. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu rendahnya akses rumah layak huni serta minimnya ketersediaan utilitas pemukiman.

Kebutuhan dasar manusia yaitu aksesibilitas masyarakat terhadap air minum dengan kualitas dan kuantitas yang memadai harus dipenuhi. Ketersediaan air minum merupakan salah satu indikator yang menandakan permukiman yang layak huni. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Papua kebutuhan akan air minum juga semakin meningkat. Pemenuhan kebutuhan dasar air minum dengan membandingkan antara penduduk yang berakses air minum di Papua terlihat masih belum optimal yang mana persentasenya dominan masih dibawah 50 persen dengan kecenderungan yang menurun. Untuk penyedian air minum layak konsumsi Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak salah satunya PDAM. Kinerja PDAM dalam penyediaan air minum dapat dilihat dengan menghitung rasio volume produksi riil PDAM dengan Jumlah penduduk yang terlayani. Semakin tinggi rasionya semakin baik dari sisi kuantitas. Data tahun 2016 capaian rasionya terlihat tertinggi di Indonesia yaitu 3,74 l/det per 1000 penduduk terlayani. Selain itu juga persentase penduduk yang berakses air bersih di Papua menunjukkan penurunan yaitu dari 42,37 persen tahun 2013 menjadi 28,37 persen di tahun 2017. Cakupan layanan PDAM berdasarkan data pelayanan PDAM agustus 2017 di Papua masih rendah yaitu 14,9 persen, dengan persentase kehilangan air yang mencapai 50,24 persen yang jauh di atas rata-rata Indonesia.

Selain itu juga terkait urusan perumahan, kenutuhan masyaraat akan rumah kayak huni semakin meningkat disisi lain keterjangkauan/daya beli akan rumah

terbatas yang berdampak pada kualitas rumah dan menciptakan rumah yang tidak layak huni. Pembangunan hunian yang layak untuk masyarakat perkembanganya fluktuatif di Papua. Tahun 2013-2014 terlihat meningkat sangat signifikan yaitu dari 164 menjadi 4000 unit yang kemudian berlanjut di tahun 2015 terlihat meningkat namun tidak sebesar tahun sebelumnya yaitu menjadi 4025 unit. Setelah tahun 2015 tersebut, pembangunan rumah layak huni terlihat semakin menurun sampai dengan tahun 2017 menjadi 1878 unit. Berdasarkan berbagai kondisi tersebut dapat dipetakan persoalan dalam Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagai berikut.

Tabel 4.4. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah		
1. Rendahnya tingkat	1. Belum optimalnya	1. Rendah ketersediaan rumah layak huni		
penghunian rumah layak	akses pemukiman	2. Belum memadainya pemukiman layak		
dan sehat	layak huni	huni		
		3. Daya beli penduduk yang masih rendah		
		dalam memenuhi kebutuhan rumah		
		layak huni		

4.1.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat bagian dari urusan wajib yang terkait pelayanan dasar, sehingga menjadi syarat utama sekaligus tujuan dari pembangunan daerah. Pembangunan Provinsi Papua masih terdapat permasalahan di bidang ini, misalnya ditunjukkan dengan adanya gangguan pada kondusifitas daerah dan kohesivitas sosial masyarakat.

Angka kejadian konflik di Papua tahun 2015 di dominasi oleh kejadian konflik lainnya yaitu 2.205 kejadian, kemudian disusul oleh kejadian main hakim sendiri tercatat 888 kejadian dan terakhir konflik sumber daya yang mencapai 419 kejadian dengan Kabupaten Mimika sebagai penyumbang terbesar jumlah kejadian konflik. Selain itu juga data angka kriminalitas di Papua tahun 2016 mencapai 4.844 kasus dan kemudian terlihat menurun di tahun 2017 yaitu 3.561 kasus. Kota Jayapura sebagai penyumbang terbesar kejadian kriminalitas di Papua disusul kemudian Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dipetakan masalah pokok, masalah dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah
1. Belum optimalnya penanganan	1.	Masih tingginya tingkat	1.	Belum optimalnya
terhadap penyelesaian masalah		krimalitas di beberapa	1.	koordinasi dengan instansi
keamanan, ketentraman dan		daerah rawan konflik		penegakan hukum dan
ketertiban		aderan rawan nomin		keamanan
			2.	Belum optimalnya
				penegakan perda dan
				perkada
			3.	Masih tingginya tingkat
				kejahatan yang tertangani
			4.	Belum optimalnya
				koordinasi dengan instansi
				penegakan hukum dan
				keamanan
			5.	Belum optimalnya
				penegakan perda dan
				perkada
			6.	Masih tingginya tingkat
				kejahatan yang tertangani
			7.	Belum optimalnya
				penyelesaian tindak pidana
			8.	Masih rendahnya Tingkat
				Waktu Tanggap (Response
				Time Rate) kabupaten/kota
				dalam daerah layanan
			9.	Masih rendahnya tenaga
				pengendali dan kenyamanan
				lingkungan yang terampil
	2.	Belum optimalnya peran	1.	Belum optimalnya
		Forum Koordinasi Umat		Komunikasi antarumat
		Beragama (FKUB)		beragama yang masih
	2	Daluma maalaaina almaa	2.	renggang
	3.	Belum maksimalnya pelayanan terhadap	۷.	Belum optimalnya
		kehidupan beragama		penanganan disintegrasi bangsa
		Kemuupan beragama	3.	Belum maksimalnya
			Э.	koordinasi Forkompimda
	4.	Belum optimalnya	1.	Masih rendahnya
	т.	kabupaten/kota yang	1.	pemahaman masyarakat
		melaksanakan RANHAM		terhadap HAM
		(Rencana Aksi Nasional	2.	Belum optimalnya
		HAM)		penanganan kasus
		,		pelanggaran HAM
2. Masih rendahnya pemahaman	pemahaman 3. Belum optimalnya	Belum optimalnya	1.	Masih rendahnya pendidikan
masyarakat terkait Kebebasan		kesadaran masyarakat		politik dan demokrasi dalam
Sipil, Hak-Hak Politik dan		dalam berdemokrasi		pendidikan menengah
Lembaga Demokrasi			4.	Belum optimalnya
				pembinaan terhadap
				lembaga dan partai politik
			5.	Partisipasi masyarakat
				dalam Pemilu belum optimal
			6.	Belum optimalnya
				pembinaan terhadap LSM
]	dan Ormas

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		7. Rendahnya peranan lembaga adat untuk harmonisasi regulasi dan mitra strategis pembangunan
	Potensi kebencanaan masih cukup tinggi	Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pengendali longsor
		2. Rendahnya informasi mengenai kondisi kerawanan bencana yang diketahui oleh masyarakat
		3. Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pengendali abrasi dan erosi
		4. Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana masih rendah
		5. Pola mitigasi bencana masih belum optimal dipahami oleh masyarakat

4.1.1.6. Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, terwujudnya akses dan distribusi kesejahteraan yang merata, serta terwujudnya kohesivitas sosial. Provinsi Papua masih menghadapi berbagai persoalan sosial. Dari total keluarga yang tercatat sebanyak 182.514 KK pada tahun 2017 Keluarga Sejahtera I dan Pra Sejahtera tercatat masing-masing sebesar 51,74 persen dan 27,38 persen. Selain itu, masalah kebutuhan sosial masih sangat kurang terkait kebutuhan akan pendidikan, interaksi dengan keluarga dan interaksi dengan lingkungan. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan social yang cukup besar di Papua. tahun 2013 jumlah penyandang kesejahteraan social mencapai 181.271 orang yang meningkat tajam di tahun 2017 yaitu mencapai 470.722 orang. Berikut ini pemetaan masalah pokok bidang sosial serta akar-akar masalahanya.

Tabel 4.6. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Tingginya ketimpangan dan kemiskinan	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar	Belum optimalnya perlindungan sosial bagi keluarga OAP
penduduk OAP 2. Tingginya kerentanan sosial masyarakat	bagi penduduk OAP 2. Komunitas Adat Terpencil (KAT) masih kurang mendapat perhatian	3. Belum optimalnya rehabilitasi sosial bagi PMKS

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	3. Rendahnya pemberdayaan terhadap warga KAT	4. Belum optimalnya upaya pemberdayaan sosial bagi PMKS
	4. Belum optimalinya pelayanan terhadap PMKS	 PMKS Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS Koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan PMKS masih lemah Masih rendahnya kemandirian ekonomi masyarakat. Minimnya sarana prasarana penanganan PMKS Pendataan terhadap KAT kurang optimal Rentang jangkauan terhadap KAT sangat luas
		11. Masih rendahnya koordinasi antar stakeholder dalam penanganan PMKS

4.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan yang bersifat wajib non-dasar juga merupakan bidang strategis yang perlu diketahui dinamika pembangunannya selama ini. Bidang-bidang dalam urusan ini terkait dengan urusan kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan dan perpustakaan.

4.1.2.1. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan kependudukan dan pencatatan sipil memegang peran penting dalam mempertegas hak kewarganegaraan dan efektivitas pembangunan. Pemerintah provinsi berperan memfasilitasi peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta meningkatkan akurasi data kependudukan untuk mendukung efektivitas pembangunan daerah. Persentase penduduk yang memiliki KTP berbasis NIK di Papua mengalami penurunan, yaitu dari 75,43 persen di tahun 2015 menjadi 69,74 persen di tahun 2017. Jika diperhatikan per wilayah, nampak bahwa Kabupaten yang persentase penduduknya sudah berbasis NK yang mencapai 100 persen pada tahun 2015 ada 3 kabupaten yaitu Yahukimo, Mambramo Tengah dan Deiyai, sedangkan kondisi tahun 2017 hanya 1 kabupaten yaitu Puncak.

Persentase penduduk yang memiliki KTP berbasis NIK yang terendah tahun 2015 di Lanny Jaya yaitu 29,98 persen dan tahun 2017 di Kabupaten Dogiyai dengan capaian hanya 21,98 persen. Demikian juga untuk bayi yang mempunyai akte lahir masih rendah di papua namun terlihat meningkat dari 38,41 persen tahun 2015 menjadi 39,81 persen di tahun 2017. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dipetakan permasalahan pembangunan di bidang kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Papua sebagai berikut:

Tabel 4.7. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pokok Masalah			Rumusan Masalah		Akar Masalah	
1.	Belum maksimalnya birokasi memberi	1.	Minimnya	1.	Belum optimalnya capaian	
	pelayanan publik secara transparan		Ketersediaan		penduduk yang memiliki	
	dan akuntabel		database		legal identitas	
			kependudukan	2.	Belum tersedianya data	
			•		terpilah khusus OAP	

4.1.2.2. *Kebudayaan*

Sebagai daerah dengan keberagaman suku bangsa dan budaya yang tinggi, Provinsi Papua memiliki potensi yang besar namun, kondisi tersebut sekaligus menghadapkan Papua dengan berbagai tantangan dalam pelestarian budaya asli Papua. Berikut ini pemetaan masalah pokok dan akar-akar masalah urusan kebudayaan.

Tabel 4.8. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Menurunnya kualitas dan kuantitas nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat	 Belum optimalnya pendidikan lingkungan dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat 	Rendahnya penuturan terhadap bahasa asli Papua
	Kurangnya pelestarian budaya asli Papua	Belum terdata dan terjaganya benda-benda budaya Papua
		Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok-kelompok seni (sanggar)
		Belum tersedianya ruang publik untuk ekspresi budaya
		5. Tingginya pengaruh budaya dari luar
		6. Kurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai budaya

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		7. Promosi budaya yang
		belum memadai
		8. Masih rendahnya jumlah
		pengunjung event seni
		budaya di anjungan Papua
		TMII

4.1.2.3. Kepemudaan dan Olahraga

Provinsi Papua memiliki potensi pemuda dan keolahragaan yang cukup besar. Jika potensi tersebut dikelola dengan baik maka pemuda dan olahraga dapat menjdi salah satu pengungkit daya saing Provinsi Papua. Namun demikian, penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga masih menghadapi berbagai persoalan. Berikut ini merupakan pemetaan permasalahan urusan pemuda dan olahraga.

Tabel 4.9. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

	Rumusan Masalah		Akar Masalah
1.	Belum optimalnya	1.	Minimnya event-event
	prestasi Olahraga Provinsi Papua		keolahragaan (kompetisi) tingkat daerah
2.	Belum maksimalnya penggalian bibit atlet	2.	Minimnya pembinaan terhadap olahraga
	dari usia dini	3.	Minimnya SDM keolahragaan (wasit, pelatih, tenaga
			penyelenggara event, tenaga medis olahraga)
		4.	Minimnya sarana dan prasarana olahraga
		5.	Minimnya upaya pembibitan atlet asli Papua
		6.	Rendahnya integrasi antara event-event keolahragaan
			dengan pengembangan sektor- sektor strategis lainnya
			(terutama kesehatan, pendidikan dan ekonomi)
3.	Rendahnya jati diri pemuda	1.	Merosotnya moralitas pemuda yang mengakibatkan perilaku asosial
4.	Belum optimalnya prestasi pemuda dalam pembangunan	2.	Minimnya pengembangan wawasan kebangsaan pemuda
5.	Kurangnya partisipasi	3.	Minimnya kegiatan
	pemuda dalam pembangunan		pemberdayaan bagi generasi muda
		4.	Belum tersediannya sarana dan prasarana pengembangan pemuda
		5.	•
	 3. 4. 	 Belum optimalnya prestasi Olahraga Provinsi Papua Belum maksimalnya penggalian bibit atlet dari usia dini Rendahnya jati diri pemuda Belum optimalnya prestasi pemuda dalam pembangunan Kurangnya partisipasi pemuda dalam 	 Belum optimalnya prestasi Olahraga Provinsi Papua Belum maksimalnya penggalian bibit atlet dari usia dini 4. 5. 6. Belum optimalnya prestasi pemuda dalam pembangunan Kurangnya partisipasi pemuda dalam pembangunan Kurangnya partisipasi pemuda dalam pembangunan Kurangnya partisipasi 3.

4.1.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka meningkatan derajat hidup masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Perhatian khusus yang diberikan kepada perempuan dan anak disebabkan oleh kecenderungan perempuan dan anak termarjinalisasi dalam proses-proses pembangunan. Selain itu, berbagai persoalan menyebabkan perempuan dan anak mengalami kerentanan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan cenderung mengalami peningkatan di Papua yaitu dari 57,22 persen di tahun 2013 meningkat menjadi 64,73 persen di tahun 2017. Partsipasi terbesar perempuan pada Lembaga pemerintahan tahun 2013-2015 berasal dari Kota Jayapura, disusul kemudian oleh kabupaten Nabire dan Sarmi yang berada diatas rata-rata provinsi, sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Yapen yang hanya sebesar 30,12 persen. Demikian juga partisipasi perempuan yang menduduki kursi DPRD di Papua mengalami kecenderungan peningkatan, yaitu dari 77,61 persen di tahun 2013 meningkat menjadi 79,38 persen di tahun 2017. Persentase terbesar perempuan yang menduduki kursi DPRD tahun 2013-2015 terdapat di Kota Jayapura yang mencapai 94,50 persen, kemudian disusul oleh Kabupaten Lanny Jaya yang mencapai 90,82 persen dan Kabupaten Jayapura yang mencapai 90,60 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Asmat yang hanya sebesar 49,48 persen. Berikut ini merupakan pemataan masalah hingga akar masalah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 4.10. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Tingginya ketimpangan gender dalam pembangunan	Rendahnya pembangunan perempuan	Masih tingginya jumlah kasus KDRT, baik pada perempuan maupun anak
	2. Belum optimalnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	 Partisipasi perempuan dalam berbagai kegiatan publik sangat rendah (proses pengambilan keputusan) Upaya pemberdayaan perempuan yang belum optimal Budaya Papua menempatkan posisi perempuan sebagai faktor produksi

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		5. Upaya penyadaran terkait kesetaraan
		gender masih belum optimal
		6. Pemahaman aparatur terkait kesetaraan
		gender masih rendah
		7. Masih rendahnya perencanaan
		pembangunan dan kebijakan yang
		responsif gender
		8. Tingginya kasus kekerasan terhadap
		anak

4.1.2.5. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dihadapi oleh Provinsi Papua saat ini adalah belum optimalnya perencanaan terkait jumlah dan jarak kelahiran anggota keluarga, hal ini terjadi karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam keluarga berencana. Laju pertumbuhan penduduk di Papua cenderung menurun sejak tahun 2013-2017 dengan angka di bawah 2 persen, namun untuk Kabupaten Asmat, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Mimika, Pegunungan Bintang, Tolikara, keerom, Waropen, Supiori, Mambramo Raya, Mambramo Tengah, Yalimo, Puncak dan Deiyai terlihat meningkat dari tahun 2016-2017. Perkembangan anggota keluarga di Papua terlihat stagnan yaitu 4 orang anggota keluarga, sedangkan untuk Kabupaten Jayapura dan Asmat terlihat diatas 5 jumlah anggota keluarganya. Walaupun terlihat rendah pertumbuhan penduduk, namun program pengendalian penduduk dan pelayanan KB perlu di back up oleh pemerintah provinsi maupun Kabupaten/kota. Perkembangan pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB di Papua menujukkan angka yang cenderung menurun. Tahun 2013-2015 terlihat menurun rasio akseptor KB dari 82,94 persen menjadi 33,38 persen di tahun 2015, namun kemudian kembali meningkat sampai dengan tahun 2017 yaitu 79,37 persen namun masih dibawah capaian tahun 2013. Selain itu jumlah PUS yang ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) di Papua terlihat perkembanganya fluktuatif dengan kecederungan meningkat. Tahun 2013 kebutuhan akan alat kontrasepsi yang tidak terpenuhi mencapai 40.608 pasangan, yang kemudian meningkat pesat di sampai dengan tahun 2015 yang mancapai 231.160 pasangan, kemudian menurun kembali di tahun 2016 menjadi 181.876 pasangan dan tahun 2017 kembali menurun drastic hingga mencapai 41.122 pasangan usia subur. Jika diperhatikan per Kabupaten/kota kondisi kebutuhan alat kontrasepsi yang tidak terpenuhi sepanjang tahun 2013-2017 terbesar terdapat di Kabupaten Merauke, Biak Numfor, Jayawijaya dan Jayapura. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dipetakan masalah dan akar masalah pengendalian penduduk dan pelayanan KB sebagai berikut.

Tabel 4.11. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum maksimalnya birokasi	1. Minimnya	1. Rendahnya literasi fungsi dan
memberi pelayanan publik secara	Ketersediaan	keterkaitan KB terhadap pencegahan
transparan dan akuntabel	database	resiko kesehatan
	kependudukan	2. Belum optimalnya penyediaan alat
		kontrasepsi bagi PUS
		3. Fasilitas kesehatan yang
		menyelenggarakan layanan
		pemasangan alat kontrasepsi masih
		relatif terbatas
		4. Belum optimalnya penyuluhan dan
		perencanaan KB
		5. Penempatan Tenaga penyuluh dan
		pelayanan KB yang belum merata

4.1.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa berperan penting sebagai solusi atas permasalahan kesejahteraan yang masih dialami masyarakat Papua. Pelaksanaan urusan ini sangat strategis dengan dukungan kebijakan undangundang desa dan program pemberdayaan masyarakat kampung yang telah berjalan cukup lama di Provinsi Papua sebagai bagian dari prioritas pelaksanaan otonomi khusus. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan di dalam urusan ini, misalnya dibuktikan dengan status kampung mandiri yang masih rendah di Papua. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Papua sebagai berikut:

Tabel 4.12. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah
1.	Belum maksimalnya birokasi memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel	1.	Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.	Belum optimalnya Penyelenggaraan pemerintaha kampung yang mandiri
2.	Rendahnya kampung mandiri dan berkembang di Papua	2.	Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kampung	2.	Ketersediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna di kampung masih sangat rendah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	3. Belum optimalnya fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan	3. Belum berkembangnya sentra produksi komoditi unggulan kampung
	kampung	4. Minimnya ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur kampung
		5. Belum maksimalnya penyediaan infrastruktur dasar di daerah perbatasan6. Belum optimalnya
		pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau terluar

4.1.2.7. Perhubungan

Permasalahan dalam perhubungan dengan urusan berkaitan ketidakoptimalan konektivitas transportasi. Transportasi melalui jalur udara merupakan hal yang penting, terutama untuk wilayah Pegunungan di Papua karena lebih cepat untuk menjangkaunya dan karena konektivitas antar Kabupaten yang terbatas dengan jalur darat maupun laut. Oleh karena itu Papua, memiliki jumlah bandara terbanyak di Papua. Tahun 2017, Jumlah bandara di Papua tercatat sebanyak 109 bandara yang terdiri dari bandara internasional, domestic dan perintis, dan yang terbanyak terdapat di Kabupaten Pegunungan Bintang. Jumlah penumpang terbanyak tercatat melalui bandara Sentani Jayapura dengan Jumlah yang cenderung meningkat. Tahun 2013 jumlah penumpang mencapai 1,67 juta orang dan tahun 2017 mencapai 1,9 juta orang. Berdasarkan kondisi wilayah Papua yang unik tersebut tentunya pengoperasian dan pelayanan udara membutuhkan sumber daya manusia yang handal serta dapat menerapkan teknologi dengan prosedur-prosedur penerbangan terkini serta peralatan navigasi yang dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan dan bekerja yang maksimal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah urusan perhubungan di Papua sebagai berikut:

Tabel 4.13. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan SasaranPembangunan Daerah Urusan Perhubungan

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah
Belum optimalnya	1.	Semakin	1.	Meningkatnya investasi berbasis lahan skala
pelaksanaan		menurunnya kualitas		luas yang belum menerapkan prinsip
pembangunan		udara		pembangunan berkelanjutan
yang berkelanjutan	2.	Tingginya	2.	Rendahnya penggunaan energi listrik yag

3.	pencemaran air Berkurangnya tutupan lahan	3.	terbarukan Kurangnya pengelolaan persampahan
4.	Menurunnya kualitas ekologi	4.5.6.	Meningkatnya Penggunaan BBM yang tidak ramah lingkungan Meningkatnya penggunaan barang-barang penghasil Gas Rumah Kaca Meningkatnya jumlah kendaraan di perkotaan

4.1.2.8. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan pada bidang urusan komunikasi dan informatika adalah akses komunikasi dan telekomunikasi yang belum menjangkau seluruh wilayah di Papua serta belum optimalnya kualitas kelembagaan dalam rangka peningkatan keterbukaan informasi publik. Keberadaan Jaringan TIK yang menjangkau seluruh wilayah di Papua bisa membantu mendorong berkembanganya perekonomian di Papua. Oleh karena itu keterjangkauan konetivitas layanan yang merata sangat diperlukan, selain itu juga efektifitas, keamanan, kecepatan, server dan sistem layanan yang bagus, serta SDM yang handal dalam bidang TIK akan memudahkan implementasi *e government, smart city, smart maritime* dan lainnya di Papua.

Saat ini jaringan telekomunikasi di Papua sudah menyebar di ibu kota Kabupaten dan kota, namun untuk daerah pedalamam atau wilayah sulit akses masih terbatas. Tantangan geografis dan Jumlah pelanggan yang tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan menyebabkan hanya operator Telkomsel saja yang terlihat dominan menguasai pasar Papua dengan jumlah unit BTS yang mencapai 4.461, sedangkan Indosat hanya 137 unit BTS dan XL 46 BTS di tahun 2018. Namun demikian kapasitas jaringan yang ada di Papua masih terbatas dan kecepatan layanan data yang masih lambat. Telkomsel sebagai operator yang menguasai pasar telekomunikasi di Papua sampai dengan Desember 2016 memiliki Jumlah pelanggan 1.78 juta pelanggan sedangkan pelanggan indihome di Papua tercatat 7.155 pelanggan dengan jumlah sambungan telepon mencapai 28 ribu satuan sambungan. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut.

Tabel 4.14. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

	Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah
1.	Belum maksimalnya birokasi memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel	1.	Penyediaan jaringan telekomunikasi yang masih sangat terbatas dan timpang	1.	Rendahnya akses informasi dan komunikasi
2.	Belum optimalnya pelayanan informasi dan komunikasi			 2. 3. 4. 	Masih rendahnya akses jaringan berbasis teknologi informasi Minimnya kapasitas jaringan BTS yang terbangun Minimnya kapasitas jaringan BTS yang terpelihara Rendahnya kapasitas SDM yang memiliki kompetensi dalam teknologi informasi dan komunikasi

4.1.2.9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang dihadapi di sektor koperasi dan UKM adalah rendahnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian daerah. Persentase koperasi yang aktif di Papua sampai dengan tahun 2017 hanya sebesar 52,48 persen dari total koperasi. Kabupaten Asmat memiliki persentase koperasi aktif terendah yaitu 20,73 persen, diikuti oleh Kabupaten Nabire dengan persentase koperasi aktif mencapai 30,22 persen dan Kota Jayapura yang memiliki persentase koperasi yang aktif hanya 33,32 persen. Permasalahan yang mengemuka selama ini terkait pengembangan perkoperasian di Provinsi Papua sebegai berikut.

Tabel 4.15. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan	Rendahnya peranan sektor-sektor sekunder dan tersier (non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	 Rendahnya kemampuan wirausaha dagang Barang yang diproduksi belum berorientasi pasar Keterbatasan ketersediaan dan kualitas sarana pendukung distribusi barang industri Kurangnya akses masyarakat bantuan permodalan (KUR) Terbatasnya jaringan pemasaran UKM di dalam dan ke luar daerah Kurangnya jiwa wirausaha masyarakat asli papua Rendahnya kualitas dan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		jumlah tenaga pendamping
		pengembangan koperasi dan
		UKM

4.1.2.10. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan prasyarat untuk kedaulatan pangan. Jika masyarakat di Papua tidak memiliki kedaulatan dalam memproduksi dan menghasilkan kebutuhan pangan maka akan sulit untuk menciptakan ketahanan pangan. Ketahanan pangan di Papua sampai dengan saat ini masih rendah. Untuk itu pengembangkan dan peningkatan produksi komoditi pangan local dan membudayakan konsumsi pangan local perlu ditingkatkan di Papua untuk mencapai kedulatan pangan dan menciptakan ketahanan pangan. Masalah pangan di Papua merupakan salah satu penyebab gizi buruk kondisi *stunting* di Papua.

Ketergantungan penduduk Papua pada sumber makanan padi-padian dan hewani sebagai sumber energi dan protein kurang lebih mencapai 73 persen, kondisi ini mengindikasikan bahwa sumber pangan local berupa sagu dan umbi-umbian bukan menjadi pilihan utama di Papua walaupun penduduk Papua diketahui memiliki makanan pokok sagu dan umbi-umbian. Dari data Cadangan pangan dari beras terlihat meningkat sepanjang tahun 2013-2017 dengan pertumbuhan rata-rata 45 persen, namun masalah yang ada adalah terkait distribusi yang tidak tahun kontrak terlaksana. Dari sisi Jumlah penduduk yang sangat rawan pangan di Papua, persentasenya terlihat cenderung mengalami penurunan sepanjang tahun 2013-2016, yaitu dari 41,04 persen tahun 2013 menjadi 28,18 persen di tahun 2016, sedangkan untuk penduduk rawan pangan cenderung meningkat persentasenya yaitu dari 29,63 persen tahun 2013 menjadi 31,78 persen pada tahun 2016, sedangkan penduduk yang tahan pangan di Papua cenderung meningkat yaitu dari 29,33 persen tahun 2013 menjadi 40,04 persen tahun 2016. Sedangkan untuk daerah rawan pangan terlihat ada penurunan dari tahun 2013-2015, namun untuk tahun 2015-2016 terlihat tetap dengan jumlah 13 daerah rawan pangan dan untuk daerah tahan pangan terlihat meningkat dari 1 daerah menjadi 16 daerah tahan pangan di Papua. Berdasarkan kondisi ketahanan pangan tersebut, dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut.

Tabel 4.16. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah
1. Rendahnya ketahanan pangan	1.	Tingginya kerawanan pangan pada penduduk	1.	Rendahnya produktifitas pangan lokal
2. Rendahnya konsumsi	2.	Rendahnya diversifikasi pangan lokal pengganti beras	2.	Rendahnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan
pangan lokal	3.	Rendahnya ketersediaan pangan	3.	Beum memadainya lumbung pangan di wilayah perdesaan
	4.	Sulitnya akses distribusi pangan	4.	Rendahnya produksi tanaman pangan lokal Papua
	5.	Belum adanya kontrol yang baik untuk menjaga konsumsi dan keamanan pangan	5.	Belum optimalnya ketersediaan lumbung pangan lokal
	6.	Tingginya ketergantungan pada sumber energi dan protein padi-	6.	Belum optimalnya diversifikasi pangan lokal
		padian dan hewani	7.	Belum adanya sertifikasi layak konsumsi dari dalam daerah
			8.	Panjangnya rantai distribusi pangan yang berakibat pada penurunan kualitas pangan
			9.	Ketersediaan dan keterjangkauan ekonomi terhadap pangan masih terbatas
			10.	Belum optimalnya sosialisasi budaya konsumsi pangan lokal
			11.	Masih rendahnya minat konsumsi pangan local sebagai sumber energi
				dan protein utama
			12.	Terbatasnya akses penduduk pada makanan local dan bergizi
			13.	Ketahanan pangan pada keluarga OAP relatif masih rendah

4.1.2.11. Penanaman Modal Daerah

Sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2017, trend investasi di Papua mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp109.304.355 juta di tahun 2013 naik menjadi Rp122.549.122 juta di tahun 2017, namun dari Jumlah investornya mengalami penurunan yaitu dari 168 di tahun 2013 menjadi 87 di tahun 2017. Dari sisi penyebarannya investasi terbesar berasal dari Kabupaten Mimika disusul kemudian oleh Kabupaten Merauke dan Jayapura. Secara keseluruhan sampai dengan tahun 2017 terdapat 233 investor yang penanamkan modalnya di Papua yang 70 persen diantaranya merupakan PMA. Permasalahan yang dihadapi di sektor penanaman modal adalah belum optimalnya kinerja investasi dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Permasalahan ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

Tabel 4.17. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal Daerah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya daya saing perekonomian wilayah	Realisasi investasi yang relatif masih rendah	Minimnya infrastruktur pendukung investasi
		Belum memadainya promosi investasi

4.1.2.12. Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja di Papua cenderung meningkat yaitu dari 1.688.876 orang di tahun 2013 menjadi 1.762.841 orang di tahun 2017 dengan tingkat pengangguran terbuka yang juga cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka di Papua mencapai 3,23 persen dan tahun 2017 tercatat 3,86 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Walaupun tingkat pengangguran rendah di Papua sampai dengan tahun 2017, tenaga kerja yang terserap masih didominasi berpendidikan sampai dengan SD. Tahun 2013 tenaga kerja dengan Pendidikan sampai dengan SD mencapai 64,65 persen dan tahun 2017 mencapai 58,45 persen. Penduduk yang bekerja di sector pertanian mendominasi sepanjang tahun 2013-2017 dengan jumlah yang cenderung mengalami penurunan namun dari sisi persentasenya cenderung mengalami peningkatan, sedangkan untuk orang yang bekerja di sector jasa dan industry/manufaktur cenderung mengalami peningkatan namun dari sisi persentasenya mengalami penurunan. Rasio penduduk yang bekerja mencapai di Papua tahun 2017 mencapai 96,38 persen, sedangkan untuk Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura rasio orang yang bekerja paling rendah dibandingkan Kabupaten lainnya di Papua yaitu di bawah 90 persen. Selain itu dari sisi keterlibatan penduduk usis produktif yang aktif secara ekonomi (TPAK) di Papua persentasenya cederung menurun. Dari 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2013, 78,01 persennya bersedia untuk aktif secara ekonomi, sedangkan di tahun 2017 turun mencapai 76,94 persen. TPAK di Kabupaten Waropen terlihat paling rendah, diikuti oleh Kabupaten Jayapura, Yalimo dan Kota Jayapura dengan capaian dibawah 60 persen pada tahun 2017. Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan di Papua, dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 4.18. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja

Pokok Masalah	Rumusan Masa	lah Akar Masalah
Rendahnya daya	1. Belum optimalnya	1. Kualitas tenaga kerja yang rendah
saing	partisipasi angkata	n kerja 2. Pencari kerja yang lebih dominan pada
perekonomian	yang berpendidika	n tinggi pendidikan rendah
wilayah		3. Belum memadainya kualitas Balai
		Latihan Kerja
		4. Tingkat kepatuhan perusahaan dalam
		menerapkan UMP yang ditetapkan
		masih sangat rendah
		5. Kurangnya minat pencari kerja
		terhadap sektor informal
		6. Rendahnya etos kerja OAP
		7. Penanganan perselisihan tenaga kerja
		belum maksimal

4.1.2.13. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi di bidang lingkungan hidup adalah banyaknya kerusakan lingkungan hidup perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti karena akan meningkat dari waktu ke waktu. Kebakaran hutan, kekeringan, bencana gempa bumi, longsor, banjir dan perubahan iklim yang ekstrim di Papua menjadi hal yang perlu diwaspadai dan diantisipasi sedini mungkin dan tidak bisa ditunda penanganannya. Diperlukan sinkronisasi perencanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang bersinergi di provinsi maupun dengan perencanaan di tingkat Kabupaten/kota di wilayah Papua dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi lingkungan hidup di Papua, maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 4.19. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan yang	1.	Semakin menurunnya kualitas udara	1.	Meningkatnya investasi berbasis lahan skala luas yang belum menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan
berkelanjutan	2.	Tingginya pencemaran air	2.	Rendahnya penggunaan energi listrik yag terbarukan
	3.	Berkurangnya tutupan lahan	3.	Kurangnya pengelolaan persampahan
	4.	Menurunnya kualitas ekologi	4.	Meningkatnya Penggunaan BBM yang tidak ramah lingkungan
			5.	Meningkatnya penggunaan barang-barang penghasil Gas Rumah Kaca
			6.	Meningkatnya jumlah kendaraan di perkotaan

4.1.2.14. Kearsipan

Kearsipan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, terutama untuk mencapai tertib administrasi dan basis data bagi pembangunan. Permasalahan yang masih terjadi terkait urusan kearsipan ialah belum optimalnya penerapan arsip secara baku di setiap perangkat daerah dan kapasitas sumber daya kearsipan yang belum memadai. Identifikasi permasalahan pembangunan di bidang kearsipan sebagai berikut:

Tabel 4.20. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan

Pokok Masalah	Rumusan Ma	salah	Akar Masalah
Belum maksimalnya birokasi memberi	1. Belum optir	nalnya 1.	Belum memadainya
pelayanan publik secara transparan	kualitas		pelestariaan arsip dan pustaka
dan akuntabel	akuntabilita	S	yang bernilai guna statis
	kinerja		

4.1.2.15. Statistik

Urusan statistik bagian dari urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Statistik sebagai urusan wajib memegang peran penting di dalam pembangunan daerah, terutama terkait penyediaan basis data. Permasalahan di bidang statistik sebagai berikut:

Tabel 4.21. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah
Belum maksimalnya birokasi memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel	1.	Belum optimalnya sinergi antar dokumen perencanaan dan penganggaran	1.	Belum optimalnya ketersediaan data SIPD
	2.	Belum optimalnya capaian indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJM	2.	Belum optimalnya ketersediaan dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas

4.1.2.16. Pertanahan

Pertanahan merupakan urusan penting di dalam pembangunan Papua. Hal ini terkait konteks lokal masyarakat Papua yang dalam kehidupannya terkait dengan erat dengan aspek agraria. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan pertanian sebagai berikut:

Tabel 4.22. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah
Belum maksimalnya birokasi	1.	Belum optimalnya	1.	Belum optimalnya ketersediaan
memberi pelayanan publik		sinergi antar dokumen		data SIPD
secara transparan dan		perencanaan dan		
akuntabel		penganggaran		
	2.	Belum optimalnya	2.	Belum optimalnya ketersediaan
		capaian indikator		dokumen analisis kinerja
		kinerja sasaran daerah		pembangunan daerah yang
		dalam RPJM		berkualitas

4.1.2.17. Persandian

Persandian merupakan bagian dari urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan persandian terkait keamanan informasi daerah. Permasalahan pembangunan daerah yang terkait urusan persandian sebagai berikut:

Tabel 4.23. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Persandian

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya	1. Belum optimalnya pola	 Belum optimalnya sandi
penyelenggaraan persandian	penetapan hubungan sandi	dalam komunkasi
untuk pengamanan informasi	antar perangkat daerah	Perangkat Daerah
daerah		2. Belum optimalnya
		pelaksanaan standar
		operasional prosedur
		persandian

4.1.2.18. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan kebutuhan seklaigus prasyarat krusial dalam meningkatkan literasi masyarakat. Meskipun perkembangan teknologi informasi telah memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan diluar perpustakaan namun, penyelenggaraan urusan perpustakaan merupakan leading sector dalam mewujudkan budaya membaca dan penyebaran perkembangan ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, penyelenggaraan urusan perpustakaan di Provinsi Papua masih menghadapi berbagai persoalan di bawah ini:

Tabel 4.24. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Akses, mutu dan tata kelola	1. Rendahnya minat	1. Kualitas sarana dan prasarana

pendidikan belum optimal	2.	membaca pada masyarakat Daya jangka kepustakaan yang	2.	perpusatakaan daerah yang sangat tidak memadai Keterbatasan masyarakat dalam mengakses perpustakaan
		sangat terbatas		

4.1.3. Urusan Pilihan

Meskipun berada dalam urusan pilihan, namun berbagai bidang di dalam urusan ini tetap menjadi hal strategis yang perlu diulas dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah. Urusan ini terkait dengan dinamika optimalisasi potensi lokal daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan berbagai bidang dalam urusan pilihan, merupakan bidang strategis yang menentukan masa depan pembangunan Provinsi Papua:

4.1.3.1. Pertanian

Sector Pertanian peranannya terlihat menurun dalam pembentukan PDRB ADHK Papua sepanjang tahun 2013-2017 dengan kontribusi rata-rata mencapai 11,38 persen dengan Kabupaten Sarmi dan Keerom sebagai penyumbang terbesar. Kontribusi terbesar sector pertanian berasal dari tanaman palawija yang mencapai 59,69 persen, disusul kemudian oleh perkebunan yang mencapai 15,66 persen pertahun. Nilai Tukar Petani di Papua terlihat mengalami penurunan dengan angka dibawah 100. Tahun 2013 NTP di Papua tercatat sebesar 98,57 dan tahun 2017 turun menjadi 93,26 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa petani mengalami deficit yaitu kenaikan harga produksi relative lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya yang mengindikasikan bahwa pendapatan petani turun lebih kecil dari pengeluarannya. Selain itu juga dari sisi produksi terihat mengalami penurunan baik untuk palawija maupun perkebunan di Papua. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah pertanian sebagai berikut:

Tabel 4.25. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Pertumbuhan ekonomi yang tidak	1. Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Masih rendahnya kualitas kelembagan petani
berkualitas	2. Rendahnya tingkat kesejahteraan	Rendahnya spesialisasi dan
	petani/peternak	peningkatan kualitas produk-
		produk pertanian yang dapat meningkatkan NTP
	3. Rendahnya kontribusi sektor industri berbasis pertanian	3. Masih rendahnya kualitas kelembagan petani

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	terhadap perekonomian daerah Kontribusi sektor pertanian	 Rendahnya spesialisasi dan peningkatan kualitas produkproduk pertanian yang dapat meningkatkan NTP Belum optimalnya produksi pangan lokal Rendahnya kualitas produk pangan lokal Belum memadainya kawasan pertanian pangan yang berkelanjutan Masih kurangnya ketersediaan
	terhadap perekonomian daerah semakin menurun yang diikuti kesejahteraan petani yang menurun	dan kualitas penyuluh
		 Belum terbangunnya sistem agribisnis yang kuat Belum memadainya kompetensi penyuluh lapangan pertanian Masih belum optimalnya ekstensifikasi dan intensifikasi lahan Belum optimalnya penerapan metode pertanian modern Masih terbatasnya teknologi tepat guna pertanian Rendahnya kualitas/standarisasi produk pertanian/perkebunan Rendahnya produktifitas tanaman perkebunan Keterbatasan infrastruktur jaringan irigasi tersier di kawasan pertanian Panjangnya rantai distribusi produk pertanian/perkebunan Rendahnya promosi produkproduk unggulan pertanian/perkebunan Rendahnya kontinuitas produksi pertanian/perkebunan
1.	hasil peternakan	Belum optimalnya pelayanan kesehatan dan pengawasan hewan ternak
2.	Akses peternak terhadap pasar lokal masih belum memadai	 Skala usaha peternakan masih kecil Kapasitas peternak dalam memenuhi kebutuhan lokal sangat rendah Rendahnya sertifikasi produk hasil ternak

4.1.3.2. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi di sektor perikanan adalah rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah. Sepanjang tahun 2013-2017 kontribusi sector perikanan dan kelauatan terlihat menurun yaitu dari 856 persen di tahun 2013 menjadi 7,68 persen ditahun 2017 dengan rata-rata kontribusi sebeesar 8,09 persen pertahun. Walaupun dari sisi kontribusi sector perikanan mengalami penurunan dari dari sisi produksi terlihat mengalami peningkatan dengan rata-rata 1,09 persen pertahun khususnya dari perikanan budidaya dengan luas lahan meningkat 1,02 persen dan Jumlah pembudidayaan yang meningkat sebesar 2,5 persen. Pengembangan budidaya perikanan sudah tersebar di 29 kabupaten/kota yang berbasis lima wilayah adat. Kendala aksesbilitas pelaku indusri perikanan dengan pembangunan infrastruktur yang memadai masih merupakan kendala termasuk membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu di Kabupaten Merauke, Mimika dan Biak Numfor. Permasalahan ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

Tabel 4.26. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan	1.	Belum optimalnya produksi budidaya perikanan air tawar	1.	Belum memadainya kelembagaan kelompok nelayan
pembangunan yang berkelanjutan	2.	Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah masih rendah	2.	Rendahnya kualitas SDM dan jumlah penyuluh perikanan tangkap
	3.	Rendahnya kontribusi sektor industri berbasis perikanan terhadap perekonomian daerah	3.	Masih terbatasnya teknologi perikanan tangkap
	4.	Rendahnya kontribusi koperasi dan UKM sektor perikanan terhadap perekonomian daerah	4.	Masih rendahnya kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung produksi perikanan
	5.	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	5.	Belum memadainya kelembagaan kelompok pembudidaya ikan tawar
			6.	Rendahnya kualitas SDM dan jumlah penyuluh perikanan tangkap
			7.	Belum optimalnya penyediaan benih/bibit unggul dan pusat pembibitan ikan
			8.	Keterbatasan sarana dan prasarana produksi budidaya ikan air tawar
			9.	Meningkatnya pemukiman masyarakat di daerah tangkapan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		sumber air baku

4.1.3.3. Kehutanan

Jika diperhatikan dari distribusi penyebaran kawasan hutan di Papua, dari luas 32.757.059 ha, proporsi terbesar yaitu 23,88 persen merupakan hutan lindung, 20,49 persen merupakan suaka alam dan pelestarian alam, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi dapat dikonversi masing-masing dengan proporsi 18,22 persn dan 14,48 persen, dan 12.58 persen. Permasalahan yang dihadapi di sektor kehutanan adalah rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah dan tingginya laju deforestasi. Peranan sub sektor kehutanan dalam perekonomian Papua sepanjang tahun 2013-2017 terlihat menurun dari 2,61 persen di tahun 2013 menjadi 2,34 persen di tahun 2017 dengan rata-rata kontribusi 2,47 persen pertahun. Jika dilihat dari produksi kayu hutan Papua dari tahun 2013-2016 terlihat variatif volumenya dengan produksi terbesar berturut-turut yaitu kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis dan terakhir verner. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sector kehutanan di Papua sebagai berikut:

Tabel 4.27. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kehutanan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan yang	Degradasi kawasan lindung Tingginya	Koordinasi pengelolaan lingkungan hdup provinsi dan Kabupaten/kota perlu ditingkatkan
berkelanjutan	kerusakan hutan	Belum optimalnya pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti buah merah, sagu
		Pemberdayaan masyarakat adat sekitar hutan
		Pemberdayaan masyarakat adat sekitar hutan
		5. Kurangnya pengawasan terhadap kawasan hutan
		6. Investasi pada bidang kehutanan masih berorientasi pada pemanfaatan hasil hutan kayu
		7. Tingginya pembukaan lahan karena pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah
		8. Tingginya pola pembukaan lahan berpindah
		9. Belum disahkannya regulasi khusus pengelolaan hutan adat di Provinsi Papua
		10. Belum optimalnya perlindungan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		tumbuhan dan satwa liar spesifik Papua

4.1.3.4. Pariwisata

Dengan beragamnya potensi wisata di Papua, seharusnya dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi Papua, namun dari data terlihat bahwa Jumlah tamu/wisatawan WNA/WNI ke Papua cenderung mengalami penurunan sepanjang tahun 2013-2017. Data kunjungan tamu ke Papua tahun 2013 tercatat 903.157 orang namun terus menurun sampai dengan tahun 2015 menjadi 546.699 orang tamu dan kemudian naik kembali di tahun 2016 menjadi 900.570 orang tamu. Kota Jayapura mendominasi kedatangan Jumlah tamu namun terlihat angkanya menurun dari tahun 2013-2015 namun kemudian meningkat kembali di tahun 2016. Tahun 2013 kunjungan tamu ke Kota Jayapura mencapai 579,966 orang dengan lama kunjungan 2.54 hari dan di tahun 2016 tercatat sebesar 413.019 orang tamu dengan lama kunjungan 1,8 hari. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan pariwisata di Papua dan masih rendahnya minat wisatawan untuk berkunjung ke Papua. Kondisi ini menyebabkan kontribusi sector pariwisata terhadap perekonomian Papua juga masih rendah yaitu rata-rata 2,45 persen pertahun. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah urusan pariwista sebagai berikut:

Tabel 4.28. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan	1.	Rendahnya peranan sektor-sektor sekunder dan tersier (non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	 2. 3. 4. 6. 7. 	Pengembangan ekoturisme dan wisata budaya yang bernilai tambah tinggi untuk mendukung pengembangan kemandirian ekonomi dengan dampak lingkungan dan budaya serendah mungkin Belum optimalnya kelembagaan kelompok pengelola wisata Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Rendahnya kualitas infrastrukur pendukung pariwisata Rendahnya kualitas fasilitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata Keterbatasan kualitas penyelenggaraan eventevent pariwisata Masih kurangnya pengembangan daerah obyek tujuan wisata (DOTW) potensial dan DOTW yang sudah ada

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		8. Belum optimalnya pengembangan kampung wisata
		9. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak pengembangan pariwisata
		10. Terbatasnya promosi pengembangan pariwisata Provinsi Papua di event-event nasional dan internasional yang disertai analisa pasar yang baik
		11. Kurangnya partisipasi dalam event-event pariwisata nasional maupun internasional

4.1.3.5. Perdagangan

Total ekspor Papua tahun 2016 mencapai 2.004,04 juta dolar Amerika meningkat menjadi 2.545,59 juta dolar Amerika di tahun 2017 atau meningkat sebesar 22,48 persen dari tahun 2016. Menurut jenisnya, ekspor Papua terbesar berupa barang migas yaitu sebesar 2,900 juta dolar Amerika dan barang non migas sebesar 538,36 juta dolar Amerika (BPS Papua, 2017). Ekspor terbesar Papua berasal dari Pelabuhan Amamapare Mimika dengan nilai 529,47 juta dolar Amerika atau sebesar 98,35 persen dari keseluruhan ekspor Papua. Namun untuk impor mengalami penurunan dari 715,59 juta dolar Amerika di tahun 2016 menjadi 446,51 juta dolar ditahun 2017 atau turun sebesar 37,60 persen. Jika dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukkan PDRB Papua tahun 2013-2017 maka sector perdagangan masih rendah peranannya yaitu dengan rata-rata 7,92 persen pertahun. Namun jika dilihat persebarannya menurut Kabupaten/kota di Papua, maka Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan kontribusi yang cenderung meningkat dengan persentase terbesar dengan rata-rata 17,42 persen pertahun, diikuti oleh Kabupaten Biak Numfor dan kota Jayapura namun dengan kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB Papua yang cenderung menurun yaitu rata-rata kontribusi masing-msing sebesar 16,50 persen dan 16,17 persen pertahun. Sedangkan Kabupaten Mimika dan Paniai merupakan Kabupaten dengan kontribusi sector perdagangan terendah yaitu masing-masing dengan rata-rata sebesar 2,14 persen dan 3,40 persen pertahun. Berdasarkan kondisi sector perdagangan tersebut maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 4.29. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah	
Tingginya ketimpangan	1. Belum optimalnya	 Panjangnya rantai distribusi 	

dan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan		pangan ke berbagai wilayah
penduduk OAP	dasar bagi penduduk OAP	2.	Besarnya ongkos angkut distribusi
			pangan
		3.	Rendahnya kualitas infrastruktur
			pendukung distribusi pangan
		4.	Rantai pemasaran pangan yang
			masih panjang
		5.	Kurangnya kontinuitas
			ketersediaan barang karena
			persoalan akses dari hulu ke hilir
		6.	Rendahnya ketersediaan bahan
			baku produksi
		7.	Rendahnya daya beli keluarga OAP

4.1.3.6. Perindustrian

Kontribusi sektor perindustrian dalam pembentukkan PDRB Papua terlihat masih rendah dengan angka rata-rata dibawah 2 persen yang cenderung menurun sepanjang tahun 2013-2017 dengan laju pertumbuhan rata-rata 5,85 persen pertahun. Jika diperhatikan persebarannya, maka Kabupaten Boyen Digul sebagai penyumbang terbesar sector perindustrian yaitu mencapai rata-rata 26,97 persen dengan laju pertumbuhan 4,10 persen pertahun namun dengan kontribusi yang terlihat konsisten menurun. Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom, kepulauan Yapen, Biak Numfor, Merauke, dan Asmat kontribusinya terhadap pembentukkan PDRB Papua juga terlihat berada diatas rata-rata Papua yaitu berkisar 2 sampai dengan 5 persen sedangkan Kabupaten/kota lainnya kontribusinya dibawah rata-rata Papua. Laju pertumbuhan rata-rata tertinggi sector perindustrian terdapat di Kabupaten Mambramo Tengah yaitu sebesar 9,18 persen pertahun, diikuti oleh Kabupaten Nabire dan Pegunungan Bintang masing-masing dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 8,38 persen dan 8 persen pertahun. Berdasarkan kondisi sector perindustrian tersebut maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 4.30. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan	 Rendahnya peranan sektor- sektor sekunder dan tersier 	Belum adanya konsep kluster industri hasil hutan
pembangunan yang berkelanjutan	(non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	2. Rendahnya kualitas kelembagaan pelaku industri
		3. Belum adanya rencana induk pembangunan industri daerah, yang akan melahirkan pembangunan

kluster industri per wilayah adat

4.1.3.7. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kebutuhan akan energi dan sumber daya mineral semakin lama semakin meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia. Di sektor migas demikian juga, seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi, perkembangan penduduk, perkembangan jumlah kendaraan baik mobil dan motor, juga meningkat akibatnya permintaan akan BBM juga semakin meningkat, namun disisi lain untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut pemerintah perlu mengimpor sumber daya tersebut. Penghematan penggunaan BBM sudah harus dilakukan. Selain itu juga ketergantungan pada sumber daya fosil juga perlu menjadi perhatian karena akan habis jika dipakai secara terus menerus dan boros, oleh karena itu pengembangan dan penggunaan sumber baru dan terbarukan sudah harus menjadi perhatian pemerintah Papua ke depannya. Penggunaan energi baru dan terbarukan sudah harus diintensifkan karena masih terdapat kabupaten di Papua yang belum menikmati listrik.

Di sektor kelistrikan, dari data yang ada terlihat bahwa jumlah pelanggan listrik di Papua mengalami peningkatan sepanjang tahun 2013-2017. Tahun 2013, jumlah pelanggan listrik tercatat sebanyak 276.724 pelanggan dan tahun 2017 mencapai 384.833 pelanggan. Demikian juga untuk daya terpasang (KW) di Papua nampak meningkat, yaitu dari 187.598 KW tahun 2014 meningat menjadi 340.751 KW. Pelanggan terbesar dan juga daya terpasan terbesar terdapat di Kota Jayapura. Di sektor pertambangan, terlihat bahwa Papua masih tergantung pada sector ini namun kontribusinya terhadap perekonomian cenderung menurun sepanjang tahun 2013-2017. Tahun 2013, kontribusi sector pertambangan mencapai 43,56 persen dan tahun 2017, kontribusinya mencapai 41,78 persen. Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut.

Tabel 4.31. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan ESDM

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas	Rendahnya peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan antarpersonal maupun antarsektor	 Belum efektifnya proses perizinan pertambangan (IUP) Belum optimalnya pengawasan pertambangan emas tanpa izin (PETI)

3.	Kuantitas dan kualitas penelitian dan survey pelayanan geologi masih sangat kurang
4.	Rendahnya kompetensi tenaga kerja lokal di sektor pertambangan
5.	Rendahnya daya serap sektor pertambangan dalam menyerap produk-produk pertanian lokal
6.	Masih rendahnya ekspor barang nonmigas
7.	Minimnya ketersediaan energi listrik untuk kegiatan industri
8.	Rendahnya pemanfaatan energi listrik baru terbarukan

4.1.4. Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi penunjang pemerintah memegang peran penting dalam menjalankan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua. Efektivitas pelaksanaan fungsi penunjang menjadi instrumen untuk menjalankan pemerintahan yang akuntabel, transparan, responsif, dan partisipatif. Berdasar analisis pembangunan Provinsi Papua pada periode sebelumnya sebagaimana data yang disajikan di Bab 2, fungsi penunjang urusan pemerintahan ini di satu sisi telah berhasil memenuhi capaian indikator kinerja daerah. Di sisi lain, terdapat pula berbagai permasalahan pada fungsi penunjang yang menghambat pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, menghambat koordinasi lintas sektoral, serta adanya tantangan berupa capaian kinerja yang belum menjawab permasalahan nyata di masyarakat. Permasalahan pembangunan daerah terkait fungsi penunjang urusan pemerintahan terdapat pada urusan perencanaan, keuangan, pengawasan, kepegawaian hingga kesekretariatan.

4.1.4.1. Administrasi Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat daerah dan sekretariat DPRP dan MRP serta beberapa perangkat daerah lainnya. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan berupaya memberi keyakinan bahwa selurh sektor pemerintah menjalankan agenda pembangunan secara terpadu dan terkordinasi sehingga

Tabel 4.32. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Pemerintahan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah			

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah
Belum maksimalnya	1.	Belum optimalnya kapasitas	1.	Belum maksimalnya Perdasi
birokasi memberi pelayanan	1.	aparatur dalam	1.	tentang pemerintahan yang
publik secara transparan		penyelenggaraan		ditetapkan
dan akuntabel		pemerintahan dan	2.	Belum optimalnya SDM
dan anantaber		pelayanan publik		kampung dan distrik
	2.	Belum optimalnya kualitas	3.	Masih rendahnya LPPD
		akuntabilitas kinerja	0.	kabupaten/kota yang
				berpredikat Sangat Tinggi
			4.	Belum optimalnya Penataan
				Peraturan Perundang-undangan
			5.	Belum optimalnya warga miskin
				yang memperoleh
				pendampingan terkait kasus
				hukum
			6.	Belum optomalnya Produk
				Hukum Kabupaten/Kota se
				Papua yang difasilitasi
			7.	Rendahnya produk hukum
				daerah yang didesiminasi
			8.	Belum optimalnya OPD yang
				memiliki data uraian jabatan
			9.	Masih rendahnya OPD yang
				memiliki SOP yang berkaitan
				dengan kinerja utama
			10.	Belum optimalnya OPD Provinsi
				Papua yang sudah dilakukan
				analisis dan/atau evaluasi
				jabatan
			11.	Belum optimalnya Rekomendasi
				dari Analisa Beban Kerja yang
				ditindaklanjuti
			12.	Belum optimalnya kinerja
			4.0	BUMD
			13.	Belum optimalnya
				penyelenggaraan pelayanan
			1 1	keprotokolan Pemprov Papua
			14.	Belum optimalnya pelaksanaan
				pengadaan barang dan jasa melalui ULP
Rolum ontimalnya	1	Macih tarbalakangnya	1.	
Belum optimalnya pembangunan di wilayah	1.	Masih terbelakangnya wilayah perbatasan	1.	Belum memadainya sarana dan prasarana Pos Lintas Bantas
perbatasan		wiiayaii perbatasaii		yang memenuhi standar
perbatasan	2.	Minimpya nambangunan di	2.	Belum optimalnya koordinasi
	۷.	Minimnya pembangunan di daerah perbatasan	۷.	antar instansi terkait dalam
		uaei ali pei vatasali		pembangunan infrastruktur di
				kawasan perbatasan
			3.	Minimnya sarana dan prasarana
			ა.	ekonomi di daerah perbatasan
			4.	Belum optimalnya
			7.	implementasi kerja sama antar
				negara di kawasan perbatasan
	<u> </u>			negara ur kawasan perbatasan

4.1.4.2. Penelitian dan Pengembangan

Urusan perencanaan terkait perencanaan daerah dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan, perencanaan wilayah dan tata ruang, serta berbagai perencanaan sektoral berbasis penelitian dan pengembangan. Permasalahan terkait urusan perencanaan, penelitian, dan pengembangan sebagai berikut:

Tabel 4.33. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penelitian, dan Pengembangan

Pokok Masalah		Rumusan Masalah	Akar Masalah		
Belum maksimalnya birokasi memberi	1.	Belum optimalnya	1.	Belum optimalnya	
pelayanan publik secara transparan dan		implementasi		pemanfaatan hasil	
akuntabel		kelitbangan		kelitbangan	
			2.	Belum memadainya	
				SDM kelitbangan	

4.1.4.3. Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan perencanaan terkait perencanaan daerah dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan, perencanaan wilayah dan tata ruang, serta berbagai perencanaan sektoral berbasis penelitian dan pengembangan. Permasalahan terkait urusan perencanaan, penelitian, dan pengembangan sebagai berikut:

Tabel 4. 34. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah
Belum maksimalnya birokasi memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel	1.	Belum maksimalnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	1.	Belum optimalnya capaian realisasi program-program Otsus
	2.	Belum optimalnya sinergi antar dokumen perencanaan dan penganggaran	2.	Belum optimalnya Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
	3.	Belum optimalnya capaian indikator	3.	Belum optimalnya konsistensi Program RKPD kedalam APBD
		kinerja sasaran daerah dalam RPJM	4.	Masih rendahnya LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi
			5.	Belum optimalnya dokumen perencanaan yang menampung aspirasi masyarakat
			6.	Belum optimalnya asistensi Musrenbang Kabupaten
			7.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua
			8. 9.	Penyusunan LKPJ tidak tepat Waktu Belum optimalnya Evaluasi RPJMD

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Kabupaten/Kota se Papua
		10. Belum optimalnya Evaluasi RKPD
		Kabupaten/Kota se Papua
		11. Belum optimalnya ketersediaan
		analisis data informasi
		pembangunan daerah
		12. Belum optimalnya rekomendasi
		hasil kajian yang dijadikan sebagai
		pengambilan keputusan kebijakan
		ekonomi
		13. Rendahnya capaian indikator
		sasaran pembangunan bidang
		ekonomi
		14. Rendahnya capaian indikator
		sasaran pembangunan bidang
		sosbud
		15. Rendahnya capaian indikator
		sasaran pembangunan bidang fispra
		16. Belum optimalnya kerjasama pembangunan
		17. Masih perlunya peningkatan
		efektivitas sistem perencanaan
		pembangunan berbasis elektronik
	1. Tingginya pelanggaran	Belum optimalnya kesesuaian
	tata ruang	antara RTRW Provinsi dan RTRW
		Kab/Kota
		2. Kurang dimanfaatkannya hasil
		perencanaan percepatan
		pembangunan kawasan perbatasan

4.1.4.4. Keuangan Daerah

Urusan keuangan terkait kinerja pendapatan daerah, alokasi belanja, efektivitas penggunaannya bagi kebutuhan pembangunan, serta pelaporan keuangan. Kinerja keuangan pemerintahan di Provinsi Papua masih terkategori Mandiri Rendah, dengan rata-rata persentase PAD terhadap pendapatan daerah hanya 8,01 persen per tahun. jika diperhatikan menurut wilayah adat, maka semua wilayah adat menunjukan kemandirian fiskal yang rendah, dengan rata-rata persentase PAD terhadap pendapatan daerah paling tinggi sebesar 4,99 persen di wilayah Mamta, dan 1,74 persen di wilayah La Pago. Jika dipilah berdasarkan Kabupaten/kota, maka Kabupaten Mimika dan Kota Jayapura memiliki rata-rata persentase PAD terhadap pendapatan daerah paling tinggi dibanding Kabupaten lainnya di Papua, yaitu sebesar 12,57% dan 13,12% per tahun sepanjang periode 2013-2017, sedangkan Kabupaten dengan kemandirian fiskal paling rendah yakni Kabupaten Nduga, Deyiai, Intan Jaya, Mamberamo Raya, Waropen dan Dogiyai,

dengan persentasenya masing-masing tidak lebih dari 1% per tahun. Dari sisi laporan keuangan, selama tahun 2013-2016 pemberian opini TMP oleh BPK untuk setiap entitas di wilayah Papua cenderung relatif menurun, dimana pada tahun 2016 ada 12 entitas yang masih mendapatkan opini TMP. Sedangkan untuk opini WTP terlihat mengalami kenaikan setiap tahunnya, yang melonjak tinggi di tahun 2015 mencapai 8 entitas kemudian di tahun 2019 menjadi 9 entitas. Berdasarkan wilayah adat, maka wilayah adat La Pago, Mee Pago, Anim Ha dan Saireri perlu meningkatkan kualitas LKPD masing-masing sebaik mungkin agar dapat meraih penilaian WTP dimasa mendatang. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan aparatur dalam menyusun laporan keuangan dan aset yang sesuai peraturan, optimalisasi fungsi pengawasan internal di inspektorat, dan perbaikan sistem pengendalian internal. Berikut permasalahan pembangunan daerah terkait urusan keuangan:

Tabel 4.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keuangan

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah
Pokok Masalah Belum maksimalnya birokasi memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel	 1. 2. 3. 4. 	Rumusan Masalah Belum maksimalnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Belum optimalnya kualitas kelembagaan keterbukaan informasi publik Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja	1. 2. 3.	Belum optimalnya penerapan Sistem Informasi Data Pengelolaan Keuangan Belum optimalnya implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus Penyusunan APBD dan Perubahan APBD tidak tepat waktu Belum optimalnya Implementasi Analisis Standar
		akuntabilitas kinerja	5. 6. 7. 8. 9.	Belanja Daerah Belum optimalnya aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi Penyampaian LKPD tidak Tepat Waktu Tertib Administrasi BMD Penyusunan APBD kabupaten/kota yang tidak tepat waktu Belum optimalnya evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota Kabupaten/Kota Se Papua Belum optimalnya Kontribusi PAD terhadap total

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		pendapatan daerah
		11. Belum Efektifinya pendapatan asli daerah
		12. Belum optimalnya Kontribusi
		UPTB dalam pungutan
		Pendapatan Asli Daerah

4.1.4.5. Pengawasan

Urusan pengawasan terkait integritas aparatur dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Permasalahan pembangunan terkait urusan pengawasan, yaitu:

Tabel 4.36. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengawasan

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah
Belum maksimalnya birokasi	1.	Belum optimalnya sistem	1.	Belum optimalnya tenaga
memberi pelayanan publik		akuntabilitas dan		pemeriksa yang tersertifikasi
secara transparan dan		pengawasan dalam	2.	Belum optimalnya tindaklanjut
akuntabel		pengelolaan dalam	ļ	hasil pemeriksaaan
		pembangunan daerah	3.	Belum optimalnya tindak lanjut
				atas rekomendasi temuan hasil pemerikasaan
			4.	Persentase OPD dengan nilai
				SAKIP B yang masih rendah
			5.	Belum optimalnya Implementasi
				SPIP pada perangkat Daerah di
				Lingkungan Pemprov Papua
			6.	Belum optimalnya penetapan
				perdasi dan perdasus
				berdasarkan prolegda
			7.	Belum optimalnya Pembahasan
				APBD Tepat Waktu
			8.	Belum tuntasnya pengawalan
				revisi undang-undang otonomi
				khusus Papua

Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Pembangunan daerah terkait urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan merupakan upaya pelaksanaan siklus manajemen kepegawaian. Manajemen kepegawaian secara garis besar terkait peningkatan profesionalitas aparatur, peningkatan kualitas administrasi kepegawaian, serta penempatan aparatur sipil negara berbasis pada sistem merit. Pelaksanaan urusan ini di Provinsi Papua masih mengalami beberapa permasalahan, yaitu:

Tabel 4.37. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Belum maksimalnya birokasi memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel	Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	 Masih rendahnya kapasitas SDM dalam melakukan promosi potensi daerah Belum optimalnya ASN peserta diklat teknis fungsional Belum optimalnya ASN peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Belum optimalnya penyelesaian administrasi kepegawaian Belum optimalnya Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda Masih rendahnya ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya

Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Pendidikan dan Pelatihan terkait pelaksanaan fungsi peningkatan kapasitas SDM pada balai diklat. Persoalan pembangunan daerah terkait urusan Pendidikan dan pelatihan adalah:

Tabel 4.38. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah
Belum maksimalnya birokasi	1.	Belum optimalnya	1.	Belum memadainya akses
memberi pelayanan publik secara		masyarakat yang		OAP dalam pendidikan
transparan dan akuntabel		mengikuti pendidikan		dan pelatihan
		dan pelatihan di balai	2.	Belum optimalnya Diklat
		diklat		yang terakreditasi

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus berdasarkan analisis situasi serta memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu-isu tersebut harus dikelompokkan dan mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun

perencanaan pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam lima tahun ke depan. Di samping itu, isu strategis mengacu pada konteks permasalahan lingkup regional, nasional dan global.

4.2.1. Isu Internasional

Perumusan isu strategis diarahkan untuk mempertimbangkan dinamika internasional. Meskipun berada dalam level provinsi, perencanaan pembangunan tidak terlepas juga dari isu krusial di level internasional. Beberapa isu strategis di bawah ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan konteks Provinsi Papua.

4.2.1.1. Sustainable Development Goals

Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melakukan pembaruan Millenium Development Goals (MDGs) dengan agenda pembangunan global yang bernama Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan-tujuan yang tertuang dalam SDGs merupakan penyempurnaan tujuan pembangunan MDGs. Melalui mandat SDGs, PBB berupaya untuk mewujudkan sumberdaya manusia global yang berkualitas, meningkatkan perekonomian global yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk 2016-2030 meliputi:

- 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
- 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
- 4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;

- 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
- 7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
- 8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- 10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
- 11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- 12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- 16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
- 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup, 17 Tujuan

dan 169 target sebagaimana tertuang dalam agenda SDGs dinilai sangat relevan untuk konteks pembangunan Papua. Untuk itu, Provinsi Papua juga berkomitmen untuk melaksanakan agenda-agenda SDGs yang targetnya dapat tercapai pada tahun 2030.

4.2.1.2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini menyebabkan perkembangan internet semakin pesat. Disertai perkembangan teknologi media telekomunikasi yang menciptakan konvergensi media, internet telah meruntuhkan sekat antar masyarakat bahkan dalam level global. Membanjirnya informasi bisa dimaknai sebagai peluang maupun tantangan bagi pemerintah daerah.

Bagi Provinsi Papua, teknologi komunikasi dan informasi (TIK) penting untuk membantu proses pembangunan daerah. Pembangunan lima tahun kedepan juga diharapkan dapat peka terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Tentu dalam membangun sektor ini juga tidak bisa lepas dari peran sektor-sektor lain termasuk kondisi infrastruktur listrik dan jaringan.

4.2.1.3. Green Economy

Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep *green economy*, yaitu ekonomi ekologis. Pengertian *green economy* merujuk pada ekonomi yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekologi sehingga praktiknya sangat memperhitungkan pengurangan resiko terhadap kelestarian lingkungan. Ekonomi ekologis tidak berarti ekonomi yang berbasis sektor lingkungan atau agraris melainkan ekonomi yang tidak mengesampingkan resiko kerusakan lingkungan dan ekologi. Misalnya perekonomian berbasis industri dengan meminimalkan penggunaan bahan bakar minyak dan gas, dan mereduksi polusi.

Prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam *green economy* tersebut menjadi pedoman perubahan arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada keberlanjutan ekologi. Misalnya, perekonomian yang berbasis industri harus meminimalkan dampak lingkungan. Bahkan pembangunan berbasis ekonomi agraris pun harus direncanakan dengan pertimbangan dampak ekologis yang minimalis. Hal penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung

perkembangan ekonomi hijau tersebut adalah dalam level perencanaan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan minimalisir dampak lingkungannya.

4.2.1.4. Masvarakat Ekonomi ASEAN

Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya dari 2020 menjadi 2015, atau lima tahun lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Konsep Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain, yaitu: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain : a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) program Pembangunan seperti MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing, g) Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC h) dan pembentukan Komite Nasional AEC 2015, i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen yaitu Masyarakat ASEAN 2025. Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh Kepala

Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut dilakukan melalui penandatanganan The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community dan The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan.

Pendeklarasian ASEAN Community 2025 menjadi momen penting karena merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak 31 Desember 2015 lalu. ASEAN Community 2025 merupakan visi ASEAN 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Political-Security Community (APSC), dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC). Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.

Memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus daerah (provinsi/kabupaten/kota) baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat berproduksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun menjadi produsen. Sebab disisi lain, Indonesia sangat membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha.

4.2.2. Penelaahan RPIMN Tahun 2015-2019

Permasalahan yang terjadi di level nasional merupakan bahan pertimbangan utama dalam rangka merumuskan isu-isu strategis provinsi. Dalam konteks tersebut, isu nasional yang sangat prioritas untuk diperhatikan adalah kebijakan nasional jangka panjang dan menengah yang dirumuskan dalam Kebijakan *NAWA CITA* dan RPJPN 2005-2025. Selain itu, isu lain yang harus diperhatikan adalah paradigm pembangunan spasial yang terkait langsung dengan Provinsi Papua yaitu pembangunan berbasis 5 Wilayah Adat.

Dalam rangka mewujudkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan, yang kemudian disebut sebagai *NAWA CITA*, yaitu sebagai berikut:

- 1. Mengahadirkan Kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
- 2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
- 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hokum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju da bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya;
- 7. Mewujudkn kemandairian ekonomi dengan menggerakan sector-sektor ekonomi domestic;
- 8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia.

NAWA CITA ini kemudian dipertegas sasaran utama yang ingin dicapai sebagaimana termaktub pada RPJPN 2005-2025, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

Tabel 4.39 Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025

RPJMN I	Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang
(2005-2009)	Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
RPJMN II	Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang
(2010-2014)	Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing daerah
RPJMN III	Menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang
(2015-2019)	Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keungulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK
RPJMN IV	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan
(2020-2024)	makmur
	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

Sumber: RPJP Nasional 2005-2025

Selain NAWA CITA dan skala prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJPN, penetapan Papua dalam beberapa wilayah adat juga harus dijadikan pedoman dalam pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. Pembagian wilayah adat di Papua sudah sejak lama diakui oleh masyarakat Papua secara umum dan kemudian pembagian wilayah ini diakomodir oleh Pemerintah Pusat sebagai satu pendekatan pembangunan di Papua. Berikut di bawah ini adalah pembagian adat yang diakomodir sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan ekonomi wilayah dan menjaga keseimbangan kemajuan daerah:

Tabel 4.40. Kawasan Pengembangan Ekonomi Berbasis Wilayah Adat Di Provinsi Papua

КРІ	Wilayah	Fokus Pengembangan
Saereri	Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen	Perikanan laut, Industri Pengalengan, Industri Perikanan Laut, pariwisata
Mamta	Kabupaten Mamberamo Raya, Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Kota Jayapura	Perkebunan dan industri kelapa sawit dan coklat, pariwisata
Me Pago	Kabupaten Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Mimika	Perkebunan dan industri sagu, buah merah, ubi jalar,pariwisata

KPI	Wilayah	Fokus Pengembangan
La Pago	Kabupaten Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Tolikara, Yalimo, Yahukimo, Puncak, dan Puncak Jaya	Perkebunan dan industri sagu, buah merah, ubi jalar,pariwisata
Ha'anim	Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel	Perkebunan dan industri karet, kelapa sawit, industri pengalengan ikan, pangan, dan peternakan

Sumber: Buku III RPJMN 2015-2019

Pembagian Papua dalam beberapa wilayah adat ini pada tahapan selanjutnya digunakan sebagai basis dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Provinsi Papua. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan gesostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Setidaknya ada empat daerah di Pulau Papua yang akan dikembangkan menjadi KEK, salah satunya di Kabupaten Merauke (persiapan penetapan KEK). Pengembangan KEK difokuskan pada sektor pertanian dan kehutanan. Walaupun saat ini Provinsi Papua belum memiliki KEK, namun pemerintah telah menetapkan lima Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis wilayah adat di Papua dengan mengembangkan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian dan pertambangan (Tabel 6). Hal ini juga dilakukan untuk mendukung sentra produksi di sektor pangan, peternakan, industri, dan pariwisata.

Untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi KPE membutuhkan penguatan konektivitas di masing-masing wilayah adat. Kebutuhan infrastruktur untuk penguatan konektivitas di pusat pertumbuhan ekonomi antara lain mempercepat penyelesaian pembangunan transportasi darat, laut, dan udara, pembangunan ruas jalan strategis nasional, dan mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Beberapa pembangunan infrastruktur untuk penguatan konektivitas di KPE Provinsi Papua antara lain:

1. Pembangunan ruas jalan, antara lain: Ruas Jalan Sarmi-Ampawar-Barapasi-Sumiangga-Kimibay, Jalan Lingkar Numfor dan Kota Biak; Ruas Jalan Depapre-Bongkrang, ruas jalan Warumbaim-Taja-Lereh-Tengon, Ruas Jalan Jayapura-

Wamena-Mulia; Ruas Jalan Sumohai-Dekai-Oksibil-Iwur-Waropko, ruas jalan Enarotali-Tiom, Ruas Jalan Wamena-Habema-Kenyam, Ruas Jalan Timika-Potowaiburu-Wagete-Nabire, Ruas jalan Yeti-Ubrub; Ruas Jalan Okaba-Sanomere-Bade, Ruas Jalan Merauke-Okaba-Buraka-Wanam-Bian-Wogikel, Ruas Jalan Okaba-Kumbe-Kuprik-Jagebob-Erambu;

- 2. Pengembangan Bandara Internasional Frans Kaisepo, Bandara Internasional Sentani, Bandara Internasional Moses Kilangin, Bandara Internasional Mopah; pembangunan Bandara di Yapen Waropen, Wamena, Dekai;
- 3. Reaktivasi Pelabuhan Biak; pengembangan Pelabuhan Peti Kemas depapre, pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Merauke; pengembangan dermaga Kenyam dan Suru-suru;

Pembangunan Terminal Tipe A Kota Jayapura, Terminal B Kabupaten Sarmi, Keerom, dan Kota Jayapura; Pembangunan jaringan kereta api mulai dari Timika ke Pegunungan Tengah Pengembangan PLTA Supiori, PLTA Mamberamo, PLTA Gayem, PLTA Hotekamp, PLTA Baliem, PLTA Urumuka, PLTS Makro. Salah satu syarat pengembangan KEK adalah ketersediaan investor yang akan menggerakkan investasi di wilayah tersebut. KEK bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat melalui hadirnya aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah. Terbentuknya KEK diharapkan semakin membangun daya saing wilayah dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2.3. Penelaahan RPJPD Provinsi Papua 2005-2025

Penelaahan RPJPD merupakan salah satu langkah yang perlu dilakukan dalam rangka perumudan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan berkenaan dalam RPJPD. Beberapa komponen utama RPJPD Papua yang menjadi dasar bagi perumusan RPJMD Papua tahun 2018-2023 adalah:

1. Visi pembangunan Provinsi Papua Tahun 2005 - 2025 adalah : *PAPUA YANG MANDIRI SECARA SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, DAN POLITIK*

- 2. Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Papua tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Papua tahun 2005-2025 sebagai berikut:
 - MISI Pertama: Mewujudkan Kemandirian Sosial adalah meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Papua yang sehat, cerdas, berbahagia, dan berinovasi tinggi untuk penguasaan, pemanfaatan, pengembangan, dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan yang adil dan merata . Tujuan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah agar semua orang dapat mengembangkan diri dan berkontribusi sesuai minat dan bakatnya masing-masing, untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 - Misi Kedua: Mewujudkan Kemandirian Budaya adalah pengembangan kelembagaan adat, agama, dan perempuan, terintegrasi ke dalam sistem formal; pengembangan jati diri masyarakatdan kebanggaan menjadi orang Papua; serta peningkatan budaya berprestasi dan inovatif.
 - Misi Ketiga: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi adalah peningkatan pemenuhan kecukupan kebutuhan dan kualitas hidup masyarakatPapua yang berbasis pada kekuatan lokal; peningkatan pembangunan infrastruktur yang membantu memenuhi kecukupan kebutuhan secara lokal; pemenuhan kebutuhan berbasis aset alam lokal secara berkelanjutan pengelolaan dan penataan ruang dan wilayah yang dirancang berdasarkan daya dukung serta peruntukan ruang yang telah disepakati bersama; tercapainya peningkatan dan pemerataan akses dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat; pengelolaan aset alam secara mandiri, berkelanjutan dan bertanggungjawab.
 - Misi Keempat: Mewujudkan Kemandirian Politik adalah peningkatan peran masyarakat yang demokratis; Peningkatan kualitas aparatur sebagai fasilitator/ mediator pembangunan; Peningkatan kesadaran dan komitmen masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa berdasarkan hukum; implementasi kelembagaan dan hukum adat ke dalam sistem formal.

Misi Kelima: Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Asli Papua adalah suatu kondisi di mana masyarakat asli Papua berperan utama dalam kepemimpinan dan pelaksanaan pembangunan di Papua, hingga pembangunan di Papua berjalan berdasarkan jati diri masyarakat asli Papua. Kemandirian ini terwujud secara merata di semua kampung dan di tingkat provinsi melalui kerjasama yang harmonis dan demokratis di antara seluruh masyarakat adat dari semua kampung. Kemandirian masyarakat asli Papua tercermin dari kemampuan masyarakat asli Papua untuk menentukan sendiri arah pembangunan Papua dan berperan utama pada berbagai sektor pembangunan.Kemandirian Masyarakat Asli Papuadiwujudkan melalui pengakuan terhadap nilai serta hak adat masyarakat asli Papua serta berbagai aktivitas percepatan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat asli Papua dalam peningkatan kualitas hidup dan kemampuan mengambil peran dalam pembangunan, berbagai inovasi affirmative action bagi masyarakat asli Papua, pengembangan IPTEK berbasis budaya asli Papua dan sumberdaya lokal, sehingga mudah diterapkan oleh masyarakat asli Papua di kampung-kampung, serta merealisasikan kewanangan, peran dan tanggung jawab orang asli Papua dalam pengambilan keputusan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka NKRI

4.2.4. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis berlangsung beriringan dengan penyusunan dokumen RPJMD ini. Dalam proses pelaksanaannya dilakukan penjaringan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Melalui proses tersebut didapatkan isu strategis pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah (secara geografis maupun budaya, dan tingkat pentingnya potensi dampak. Isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1. Kualitas hidup
- 2. Ketahanan pangan, sosial dan budaya

- 3. Ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan
- 4. Kerusakan hutan dan lingkungan
- 5. Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum

Secara umum, sebagian besar indikator TPB sudah terakomodir dalam isu strategis. Isu strategis yang paling banyak terkait dengan indikator TPB adalah isu kualitas hidup masyarakat yang mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Hasil persandingan antara Isu Strategis TPB yang didapatkan dari 34 indikator TPB yang belum tercapai dengan 5 isu strategis yang disintesis menjadi isu strategis pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.41.. Persandingan Isu Strategis dengan Indikator TPB yang Belum Tercapai

No	Target TPB	Isu Strategis Papua	No Indikator	Indikator TPB	Indikator Papua	Hasil Sintesis
1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua lakilaki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Kualitas hidup	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persentase penduduk berakses air minum	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan
2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua lakilaki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Kualitas hidup	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persentase Rumah Tangga dgn Akses Sanitasi Layak (Rumah Sehat)	Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak
3	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua lakilaki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Kualitas hidup	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.	Angka partisipasi murni (APM) pendidikan menengah (SMA)	Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak
4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua lakilaki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Kualitas Hidup	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Rasio kepemilikan akta kelahiran	Akses terhadap pendidikan
5	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan	na	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Administrasi kependudukan

No	Target TPB	Isu Strategis Papua	No Indikator	Indikator TPB	Indikator Papua	Hasil Sintesis
	menyusui, serta manula.					
6	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Ketahanan pangan, sosial dan budaya	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Ketahanan pangan
7	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Ketahanan pangan, sosial dan budaya	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Konsumsi ikan (kh/kap/org):34,26; ekspor hasil perikanan (US\$/tahun):18.903.551; jumlah unit pengolahan ikan yang bersertifikasi (unit/tahun) : 12 unit	Akses terhadap pelayanan kesehatan
8	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Kualitas hidup	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Kn)	Ketahanan pangan
9	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Kualitas hidup	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Angka kejadian Malaria	Akses terhadap pelayanan kesehatan
10	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Kualitas hidup	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.	Akses terhadap pelayanan kesehatan
11	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Kualitas hidup	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Rata-rata lama sekolah	Akses terhadap pendidikan
12	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	Kualitas hidup	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.	Akses terhadap pendidikan
13	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa	Kualitas hidup	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Akses terhadap pendidikan

No	Target TPB	Isu Strategis Papua	No Indikator	Indikator TPB	Indikator Papua	Hasil Sintesis
	tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.			tahun.		
14	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Indeks Pemberdayaan Gender	Akses terhadap pendidikan
15	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
16	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	na	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
17	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Kualitas hidup	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persentase penduduk berakses air minum	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
18	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Kualitas hidup	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Persentase Penduduk berakses air bersih	Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak
19	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Kualitas hidup	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persentase penduduk berakses air minum	Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak
20	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Kualitas hidup	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase Rumah Tangga dgn Akses Sanitasi Layak (Rumah Sehat)	Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak
21	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	Kerusakan hutan dan lingkungan	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Persentase luas lahan kritis terhadap luas wilayah	Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak

No	Target TPB	Isu Strategis Papua	No Indikator	Indikator TPB	Indikator Papua	Hasil Sintesis
22	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	Na	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Rasio elektrifikasi	Kerusakan hutan dan lingkungan
23	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Laju pertumbuhan PDRB DP	Ketahanan energi
2	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	PDRB per kapita (Rp juta)	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan
25	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non- pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan
26	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persentase tenaga kerja formal.	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan
27	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat pengangguran terbuka	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan
28	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	10.1.1*	Koefisien Gini.	Indeks Gini	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan
29	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Persentase penduduk miskin (P0)	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan

No	Target TPB	Isu Strategis Papua	No Indikator	Indikator TPB	Indikator Papua	Hasil Sintesis
30	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Kerusakan hutan dan lingkungan	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Indeks kualitas tutupan hutan	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan
31	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	Kerusakan hutan dan lingkungan	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kerusakan hutan dan lingkungan
32	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	Kerusakan hutan dan lingkungan	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Persentase luas lahan kritis terhadap luas wilayah	Kerusakan hutan dan lingkungan
33	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Tingkat Konflik Horisontal (antar suku)	Kerusakan hutan dan lingkungan
34	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Persentase PAD terhadap pendapatan	Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum

Sintesis dilakukan dengan penyesuaian isu strategis yang sudah dihasilkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya target yang ditentukan oleh TPB itu sendiri. Beberapa isu dipisahkan agar terdapat penekanan pemenuhan yang urgensinya cukup besar berdasarkan tingkat ketercapaiannya. Berdasarkan hasil sintesis di atas didapatkan 10 isu strategis prioritas pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

- 1. Administrasi kependudukan
- 2. Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak
- 3. Akses terhadap pelayanan kesehatan
- 4. Akses terhadap pendidikan
- 5. Ekonomi lokal dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan
- 6. Kerusakan hutan dan lingkungan
- 7. Ketahanan energi
- 8. Ketahanan pangan
- 9. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 10. Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum

Dari hasil KLHS, maka TPB yang perlu diperkuat dalam perencanaan program berdasarkan isu strategis adalah sbb;

- a. Menjaga dan memperbaiki transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan koordinasi (tata kelola) Lingkungan hidup dan Sumberdaya Alam; (13, 14, 15, 16);
- b. Memastikan masyarakat Papua, khususnya OAP mendapatkan Pendidikan yang layak dan memadai, Kualitas Sanitasi dan Air Bersih yang layak, Asupan Gizi dan Kesehatan Lingkungan yang baik, Pemerataan Pembanguan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang inklusif (TPB: 2, 3, 4, 5, 6, 10);
- c. Melakukan perencanaan dan menginternalisasi pembangunan ekonomi hijau dengan tetap menjaga dan melestarikan budaya masyarakat dan kearifan lokal dalam pembangunan dan tata guna lahan (TPB: 7, 8, 16).

Dari penelahaan KLHS, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, diantararanya:

- 1. Indikator kegiatan yang tercapai masih sangat rendah yakni 10% (25 indikator dari 236 indikator yang ditetapkan) sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan capaian indicator dapat dipenuhi pada batas waktu RPJMD.
- 2. Untuk indikator capaian yang belum dilaksanakan dan tidak tersedia datanya, Pemprov Papua perlu melakukan identifikasi dan pengumpulan data dari berbagai sektor.
- 3. Indikator-indikator yang belum tercapai sebagian dikarenakan karena data belum terinventaris dengan baik. Pemprov diharapkan segera berkoordinasi dengan badan atau lembaga-lembaga pusat penyedia data untuk memastikan data-data tersebut dapat dimanfaatkan dan selanjutnya diolah dalam format capaian indikator Selanjutnya data tersebut dapat dianalisis yang lebih mendalam.

4.2.5. Isu-Isu Strategis Provinsi Papua

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Provinsi Papua dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Provinsi Papua. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua tahun 2018-2023 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran organisasi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis utama Provinsi Papua, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi), baik dari Status Golongan Pendapatan, Gender maupun Antar Wilayah

Isu strategis ini didasarkan pada kondisi ketertinggalan yang dialami oleh hampir semua wilayah di Papua dalam bidang pendidikan, kesehatan dan jaminan ketersediaan gizi yang memadai.

Dalam bidang pendidikan, beberapa indikator menunjukkan bahwa daya saing pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas masih terkendala oleh berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan pokok misalnya adalah; cakupan sekolah pada daerah dengan aglomerasi rendah belum optimal, tenaga pendidik belum berkualitas dan merata, penerapan kurikulum sesuai dengan standar belum maksimal terutama di wilayah adat Lapago dan Mepago dan Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap pelaksanaan tugas masih relatif rendah

Demikian juga dalam bidang kesehatan yang kondisinya hampir sama dengan bidang pendidikan, Akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas masih menjadi faktor krusial di hampir semua wilayah Papua yang ditandai dengan masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari masih rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH) walaupun terlihat secara rerata mengalami peningkatan di Papua, Demikain juga terkait stunting (pendek) perlu mendapatkan perhatian di Papua karena capaiannya yang berada diatas rata-rata Indonesia. Fakta lainnya lagi adalah Angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua per 100.000 penduduk selama ini termasuk dalam kategori tinggi, dimana data terakhir tahun 2017 menunjukan terjadi kematian ibu sebesar 289 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Papua secara keseluruhan masih rendah, hanya 41,52% di tahun 2017, termasuk juga kunjungan K4 lengkap bagi ibu hamil sangat rendah hanya sebesar 40,90% pada tahun 2017. Sedangkan dari sumber daya kesehatan yang tersedia, terlihat bahwa sebaran puskesmas di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2016 belum terdistribusi secara merata ke 29 kabupaten/kota. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah rasio dokter terhadap penduduk, dimana pada tahun 2016 hanya mencapai 24,13 dokter per 100.000 penduduk. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab juga belum maksimalnya penanganan penyakita malaria di Provinsi Papua, sehingga sampai tahun 2017 tercatat API

Provinsi Papua paling tinggi di Indonesia yaitu 59 per 1.000 penduduk, yang cenderung meningkat bila dibandingkan tahun 2014. Dalam hal kasus HIV/AIDS terindikasi jumlah kasus kematian akibat virus mematikan tersebut terus mengalami kenaikan, hingga pada tahun 2017 tercatat ada 1.883 kematian akibat HIV/AIDS

Selanjutnya dalam bidang gizi, Papua seringkali masih dibayangi oleh adanya ancaman kelaparan di beberapa wilayah yang disebabkan oleh kondisi alam ataupun masalah rantai distribusi pangan yang kurang lancar serta beberapa penyebab eksternal lain. Oleh sebab itu, Upaya penciptaaan ketahanan pangan merupakan prasyarat untuk kedaulatan pangan. Kondisi Ketahanan pangan di Papua sampai dengan saat ini masih rendah. Untuk itu pengembangkan dan peningkatan produksi komoditi pangan local dan membudayakan konsumsi pangan local perlu ditingkatkan di Papua untuk mencapai kedulatan pangan dan menciptakan ketahanan pangan. Masalah pangan di Papua merupakan salah satu penyebab gizi buruk kondisi *stunting* di Papua

2. Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan

Kondisi kurang stabilnya kemanan serta demokrasi lokal yang kurang kondusif seringkali mengganggu aktivitas pembangunan daerah di beberapa wilayah di Provinsi Papua. Beberapa rumusan permaalahan yang patut diperhatikan kedepan terkait dengan isu strategis **Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan** adalah; masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM, tingkat kesadaran terhadap HAM masih rendah, masih tingginya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, masih tingginya konflik sosial, belum optimalnya pelayanan keagamaan antar umat, menurunnya toleransi kehidupan beragama, belum maksimalnya toleransi antar umat beragama, belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, belum optimalnya kehidupan berdemokrasi secara baik, masih banyaknya kasus money politic dalam berdemokrasi.

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Publik

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik menjadi satu isu krusial yang menjadi penyokong penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkualitas. Wujud dari penguatan tata kelola adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas serta meningkatnya pelayanan kepada publik. Disiplin ASN meningkat secara signifikan dan Pemerintah Provinsi Papua telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK atas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini memberikan indikasi bahwa upaya keras dalam memperbaiki tatakelola pemerintahan selama lima tahun terakhir, telah berada dalam arah yang benar. Meskipun demikian capaian selama periode sebelumnya masih perlu ditingkatkan dan dimantapkan. Harus ada upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tatakelola pemerintahan ini.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Reformasi birokasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Pada periode 2013-2018 telah dilakukan Reformasi Birokrasi, dilakukan dengan langkah-langkah peningkatan disiplin bagi ASN, peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan penerapan e-Government Provinsi Papua pada perencanaan dan penganggaran daerah, pendapatan daerah, investasi daerah, serta penerapan system Tunjangan Kinerja Daerah. Kesemuanya itu, diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan pelayanan publik dan penanggulangan korupsi.

Oleh karena itu langkah-langkah yang telah dilakukan akan dimantapkan dan diperkuat, demikian pula perubahan mind-set, culture-set dan pengembangan budaya kerja akan dilakukan secara lebih cepat dan terarah. Demikian juga upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantas korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government)

dan bebas KKN harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dan akan dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Reformasi Birokrasi ini juga akan memperkuat hubungan kelembagaan yang harmonis antara Pemerintah, Provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus Papua secara murni dan konsekuen

4. Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur yang Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan yang dlakukan oleh multistakeholder di Papua. Hal ini terkait dengan penciptaan kue pembangunan yang akan didistribusikan kepada seluruh masyarakat Papua. Patut dijadikan pelajaran bahwa proses pembangunan ekonomi pada masa lalu telah menciptakan pertumbuhan yang memadai namun belum mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan yang menjadi harapan seluruh masyarakat. Penyebabnya antara lain, belum cukup inklusifnya pertumbuhan ekonomi yang tercipta yang diandai dengan rendahnya pelibatan tenaga kerja lokalserta tumpuan pertumbuhan yang berbasis sektor ekstraktif yang cenderung merusak lingkungan hidup.

Pada masa mendatang perlu dinisiasi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan berbasis komoditas dan karakteristik lokal didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian perlu penguatan supra dan infrastruktur bagi percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada sektor-sektor ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan perikanan dan kelautan, Disamping itu perhatian juga harus diarahkan pada pengembangan sektor-sektor non ekstraktif dan ekonomi kreatif yang memberi nilai tambah berlipat seperti; sektor industri, perdagangan dan pariwisata.

5. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten serta Peningkatan Kualitas Ekosistem dan Jasa Lingkungan

Isu strategis pengurangan kesenjangan, peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah dan kabupaten serta peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan penting artinya dalam konteks pembangunan di Papua.

Terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kabupaten bisa jadi disebabkan oleh tidak memadainya infrastruktur wilayah yang mengakibatkan mahalnya investasi bagi pengembangan wilayah disamping belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal sehingga nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu wilayah terhitung tidak memadai dan kurang menarik bagi investor. Disamping itu, pengelolaan potensi suatu wilayah seringkali berhadapan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, kedepan harus dicari terobosan pengembangan potensi wilayah yang selaras dengan peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan.

DAFTAR ISI

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV.1
4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	IV.1
4.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	IV.1
4.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	
4.1.3. Urusan Pilihan	
4.1.4. Penunjang Urusan Pemerintahan	
4.2. ISU-ISU STRATEGIS	IV.40
4.2.1. Isu Internasional	
4.2.2. Penelaahan RPJMN Tahun 2015~2019	
4.2.3. Penelaahan RPJPD Provinsi Papua 2005~2025	
4.2.4. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
4.2.5. Isu-Isu Strategis Provinsi Papua	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	v

DAFTAR TABEL

Tabel	4.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan PendidikanIV.2
Tabel	4.2.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan KesehatanIV.4
Tabel	4.3.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tabel	4.4.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanIV.8
Tabel	4.5.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan MasyarakatIV.9
Tabel	4.6.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan SosialIV.10
Tabel	4.7.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan SipilIV.12
Tabel	4.8.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan
Tabel	4.9.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan OlahragaIV.13
Tabel	4.10	. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel	4.11	. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaIV.16
Tabel	4.12	. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaIV.16
Tabel	4.1	3. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan SasaranPembangunan Daerah Urusan PerhubunganIV.17
Tabel	4.14	. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan InformatikaIV.19
Tabel	4.15	. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil MenengahIV.19

Tabel	4.16.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan PanganIV.21
Tabel	4.17.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal DaerahIV.22
Tabel	4.18.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Tenaga KerjaIV.23
Tabel	4.19.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan HidupIV.23
Tabel	4.20.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan KearsipanIV.24
Tabel	4.21.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan StatistikIV.24
Tabel	4.22.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan PertanahanIV.25
		Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Persandian
Tabel	4.24.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan PerpustakaanIV.25
Tabel	4.25.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan PertanianIV.26
Tabel	4.26.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan PerikananIV.28
Tabel	4.27.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan KehutananIV.29
		Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan PariwisataIV.30
Tabel	4.29.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan PerdaganganIV.31
Tabel	4.30.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan PerindustrianIV.32
Tabel	4.31.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan ESDMIV.33
Tabel	4.32.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Administrasi PemerintahanIV.34
Tabel	4.33.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penelitian, dan PengembanganIV.36
Tabel	4. 34.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan PerencanaanIV.36
		Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keuangan
Tabel	4.36.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan PengawasanIV.39
Tabel	4.37.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepegawaian, Pendidikan, PelatihanIV.40
Tabel	4.38.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan dan PelatihanIV.40
Tabel	139 T	ahanan dan Skala Prioritas RPIPN 2005-2025

Tabel 4.40. Kawasan Pengembangan Ekonomi Berbasis Wilayah Adat Di Provinsi Papua
Tabel 4.41 Persandingan Isu Strategis dengan Indikator TPB yang Belum Tercapai .IV.53



